



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN KELAS I.B

- Alamat : Jl. Raya Tlanakan No. 9
Pamekasan, Jawa Timur
- Website : pa-pamekasan.go.id
- Email : pa.pmk126@gmail.com

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah Swt atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021, dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini menguraikan secara diskriptif tentang pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021, yang meliputi bidang teknis yustisial, administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, bidang pembinaan dan pengawasan serta bidang pembangunan. Disamping itu diuraikan pula evaluasi pelaksanaan tugas, serta beberapa hambatan dan cara pemecahannya.

Laporan ini sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pimpinan Pengadilan Agama Pamekasan kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang.

Kami telah berusaha menyusun laporan tahunan ini dengan sebaik-baiknya, namun kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kesempurnaan penyusunan laporan tahun depan.

Pamekasan, 05 Januari 2022

Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

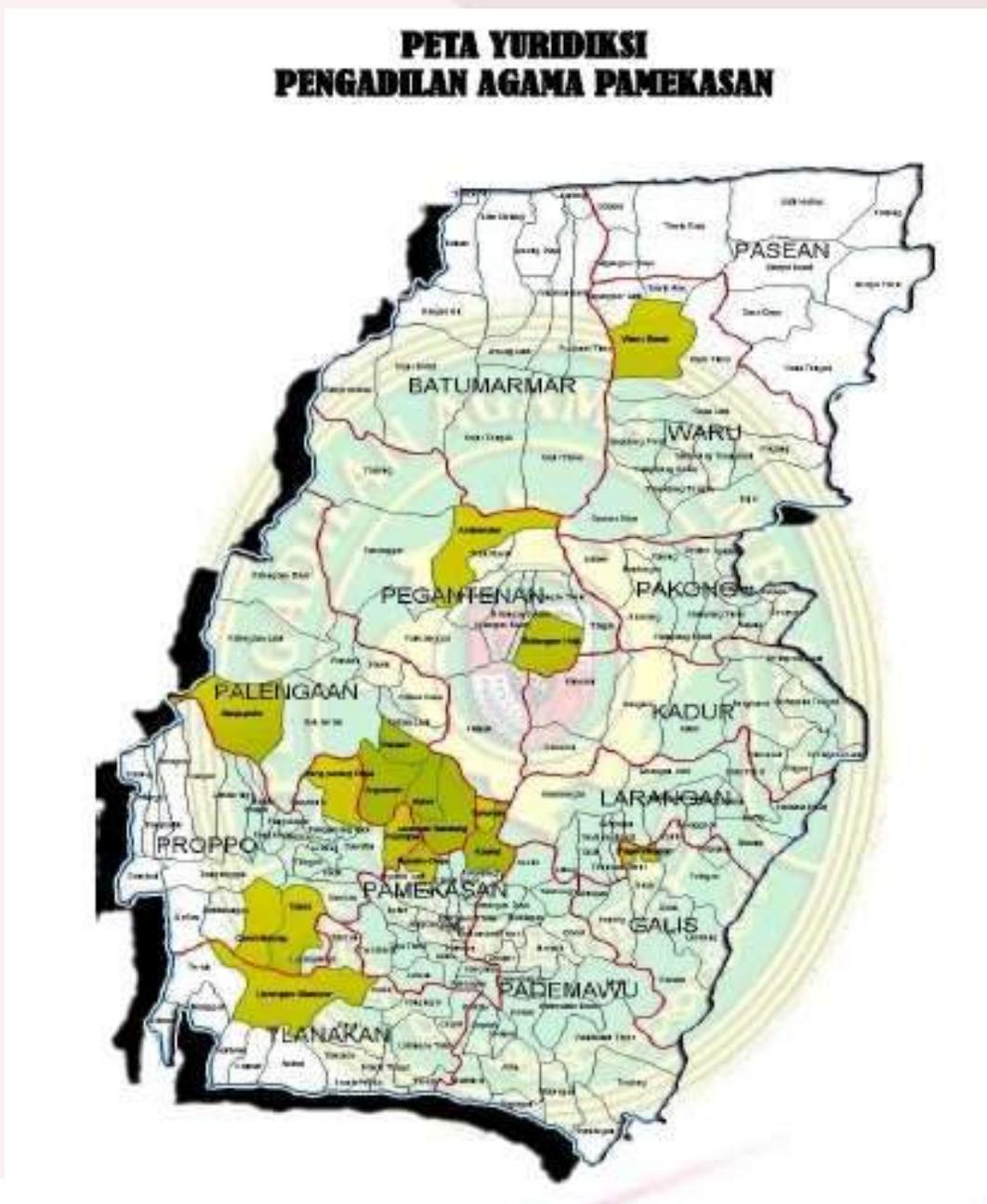


Drs. M. Shohih, S. H., M. H.

NIP. 19651017 199403.1. 002

WILAYAH YURIDIKSI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Pengadilan Agama Pamekasan yang terletak di Jalan Raya Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan memiliki Wilayah Yuridiksi yang meliputi 13 Kecamatan yang terdiri dari 11 Kelurahan dan 178 Desa di Wilayah Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Berikut Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pamekasan :



NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	
1	BATUMARMAR	1. Desa Bengsereh	8. Desa Lesong Daya
		2. Desa Batubintang	9. Desa Lesong Laok
		3. Desa Blaban	10. Desa Pangereman
		4. Desa Bujur Barat	11. Desa Ponjanan Barat
		5. Desa Bujur Tengah	12. Desa Ponjanan Timur
		6. Desa Bujur Timur	13. Desa Tamberu
		7. Desa Kapong	
2.	GALIS	1. Desa Artodung	6. Desa Pagendingan
		2. Desa Bulay	7. Desa Pandan
		3. Desa Galis	8. Desa Polagan
		4. Desa Konang	9. Desa Ponteh
		5. Desa Lembung	10. Desa Tobungan
3.	KADUR	1. Desa Bangkes	6. Desa Kertagenah Laok
		2. Desa Bungbaruh	7. Desa Kertagenah Tengah
		3. Desa Gagah	8. Desa Pamaroh
		4. Desa Kadur	9. Desa Pamoroh
		5. Desa Kertagenah Dajah	10. Desa Sokolelah
4	LARANGAN	1. Desa Blumbungan	8. Desa Montok
		2. Desa Duko Timur	9. Desa Panaguan
		3. Desa Grujukan	10. Desa Peltong
		4. Desa Kaduara Barat	11. Desa Taraban
		5. Desa Lancar	12. Desa Tentenan Barat
		6. Desa Larangan Dalam	13. Desa Tentenan Timur
		7. Desa Larangan Luar	14. Desa Trasak
5	PADEMAWU	1. Desa Baddurih	12. Desa Pademawu Timur
		2. Desa Buddagan	13. Desa Pagagan
		3. Desa Buddih	14. Desa Prekbun
		4. Desa Bunder	15. Desa Sentol
		5. Desa Dasok	16. Desa Sopa'ah
		6. Desa Durbuk	17. Desa Sumedangan
		7. Desa Jarin	18. Desa Tambung
		8. Desa Lemper	19. Desa Tanjung
		9. Desa Majungan	20. Kelurahan Barurambat Timur
		10. Desa Murtajih	21. Kelurahan Lawangan Daya
		11. Desa Pademawu Barat	22. Desa Padelegan
6	PAKONG	1. Desa Bajang	7. Desa Klompang Timur
		2. Desa Banban	8. Desa Lebbek
		3. Desa Bandungan	9. Desa Pakong
		4. Desa Bicolorong	10. Desa Palalang

		5.Desu Cenleceu	11.Desu Seddur
		6.Desu Klompang Barat	12.Desu Somalang
7	PASEAN	1.Desu Batukerbuy	6.Desu Sana Tengah
		2.Desu Bindang	7.Desu Sotabar
		3.Desu Dempo Barat	8.Desu Tegangser Daja
		4.Desu Dempo Timur	9.Desu Tlontoraja
		5.Desu Sana Dajah	
8.	PALENGAAN	1.Desu Akkor	7.Desu Palengaan Dajah
		2.Desu Angsanah	8.Desu Panaan
		3.Desu Banyupelle	9.Desu Potoan Laok
		4.Desu Kacok	10.Desu Potoan Dajah
		5.Desu Larangan Badung	11.Desu Rekkerrek
		6.Desu Palengaan Laok	12. Desu Rombuh
9	PAMEKASAN	1.Kelurahan Barurambat Kota	10. Desu Jalmak
		2.Kelurahan Bugih	11. Desu Panempan
		3.Kelurahan Gladak Anyar	12.Desu Laden
		4.Kelurahan Jungcangcang	13.Desu Teja Timur
		5.Kelurahan Kangenan	14.Desu Teja Barat
		6.Kelurahan Kolpajung	15.Desu Nyalabu Daya
		7.Kelurahan Kowel	16.Desu Nyalabu Laok
		8.Kelurahan Parteker	17.Desu Bettet
		9. Kelurahan Patemon	18.Desu Toronan
10	PEGANTENAN	1.Desu Ambender	8.Desu Pegantenan
		2.Desu Bulangan Barat	9.Desu Plakpak
		3.Desu Bulangan Branta	10.Desu Tanjung
		4.Desu Bulangan Haji	11.Desu Tebul Barat
		5.Desu Bulangan Timur	12.Desu Tebul Timur
		6.Desu Palesangger	13.Desu Tlagah
		7.Desu Pasanggar	
11	PROPPO	1.Desu.Karang Anyar	15.Desu Srambeh
		2.Desu Klampar	16.Desu Tattangoh
		3.Desu Kodik	17.Desu Tlangoh
		4.Desu Lenteng	18.Desu Toket
		5.Desu Mapper	19.Desu Badung
		6.Desu Panaguan	20.Desu Banyubuluh
		7.Desu Pangbatok	21.Desu Batokalangan
		8.Desu Panglemah	22.Desu Billa'an
		9.Desu Pangorayan	23.Desu Campor
		10.Desu Pangtonggal	24.Desu Candiburung
		11.Desu Propo	25.Desu Gro'om
		12.DesuRangperang Dajah	26.Desu Jambringin
		13.Desu Rangperang Laok	27.Desu Samiran

		14.Desda Samatan	
12	TLANAKAN	1.Desda Dabuan	10.Desda Tlesah
		2.Desda Terrak	11.Desda Larangan Tokol
		3.Desda Mangar	12.Desda Ceguk
		4.Desda Bandaran	13.Desda Panglegur
		5.Desda Kramat	14.Desda Bukek
		6.Desda Ambat	15.Desda Gugul
		7. Desda Branta Pesisir	16.Desda Larangan Slampar
		8.Desda Tlanakan	17.Desda Taro'an
		9.Desda Branta Tinggi	
13	WARU	1.Desda Bajur	7.Desda Tampojung Pregih
		2.Desda Ragang	8.Desda Tampojung Tengah
		3.Desda Sana Laok	9.Desda Tampojung Tengginah
		4.Desda Sumber Waru	10.Desda Tlontoares
		5.Desda Tegangser Laok	11.Desda Waru Barat
		6.Desda Tampojung Guwa	12.Desda Waru Timur

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Peta Yuridiksi	iv
Struktur Organisasi	vii
Bab I : Pendahuluan	1
Bab II : A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama	13
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	13
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	15
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	16
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	16
B. Penyelesaian perkara	17
- Jumlah sisa perkara yang diputus	17
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	17
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK	18
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	19
C. Akreditasi Penjamin Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	20
- Posbakum	20
- Sidang Keliling/ Pelayanan terpadu	21
- Perkara Prodeo (Pembebasan biaya perkara)	21
Bab III : Sumber Daya Manusia	23
Komposisi SDM berdasarkan Kepangkatan/golongan/ Pendidikan	23
- Mutasi	24
- Promosi	27
- Pensiun	28
- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang Mengikuti diklat)	29
Bab IV : Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi	31
A. Pengelolaan Keuangan	31
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	42
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	47
- Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Agama	48
- Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Agama	48
Bab V : Peningkatan Pelayanan Publik	51
1. Akreditasi Penjaminan Mutu	51
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	52
3. Inovasi Pelayanan Publik	56

Bab VI	: Pengawasan	59
	A. Internal	59
	B. Evaluasi	64
Bab VII	: Penutup	66
	A. Kesimpulan	66
	B. Rekomendasi	67

Lampiran-Lampiran



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Pamekasan sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di bawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana biasanya mempunyai kewajiban untuk melaporkan segala kegiatannya dengan berpedoman pada peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI. Hal ini sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI dimana pada setiap akhir tahun tiap-tiap satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI membuat laporan tahunan yang harus sudah selesai pada awal tahun berjalan.

Laporan tahunan pada tahun 2021 ini berisi mengenai kegiatan Pengadilan Agama Pamekasan sebagai institusi pelayanan publik peradilan agama yang berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Guna merealisasikan hal tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan mengambil langkah untuk senantiasa berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama selaku unsur penyelenggara pemerintahan negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Waqaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shodaqoh, dan
9. Ekonomi Syari'ah

Pengadilan Agama Pamekasan dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan Pengadilan Agama Pamekasan membuat Rencana Strategis Tahun 2021-2025 yang selalu di reviu dengan Visi "*Terwujudnya Pengadilan Agama Pamekasan Yang Agung*" sedangkan misi Pengadilan Agama Pamekasan, adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
- d. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

A. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Pamekasan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Peradilan yang transparan dan mudah diakses.
3. Percepatan penyelesaian dalam upaya hukum.
4. Kualitas putusan Pengadilan Agama Pamekasan yang dikuatkan oleh peradilan di atasnya.
5. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Pamekasan memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesain perkara dengan indikator kinerja.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan indikator kinerja.

5. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan indikator kinerja.

Dalam mencapai 5 (lima) sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Pamekasan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI.
2. Program peningkatan manajemen peradilan agama.

Untuk mewujudkan misi dan visi perlu menjunjung tinggi 8 nilai utama Mahkamah Agung Republik Indonesia:

- a. Kemandirian.
- b. Integritas
- c. kejujuran.
- d. Akuntabilitas.
- e. Responibilitas.
- f. Keterbukaan.
- g. Ketidak-berpihakan.
- h. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan untuk waktu selama 25 tahun. Bahwa program pembangunan lembaga peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2016 sampai dengan 2021 Renstra lima tahunan tersebut akan berada 7 area:

1. Area organisasi dan kepemimpinan.
Adanya kepemimpinan (leadership) yang tinggi dan management pengadilan yang responsif.
2. Area kebijakan.
Adanya kebijakan- kebijakan pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik dan akses pada keadilan.
3. Area proses berperkara.
Adanya penyelenggara persidangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
4. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur.
Adanya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berintegritas serta sarana prasarana yang memadai.
5. Area kepuasan pencari keadilan.
Terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna pengadilan
6. Area keterjangkauan.
Tersedianya pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Area kepercayaan publik.
Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Adapun program Prioritas Pembaruan di Pengadilan Agama Pamekasan meliputi :

1. Penyelesaian perkara
2. Manajemen SDM
3. Pengawasan / Pengaduan
4. Pengelolaan website
5. Pelayanan Meja Informasi
6. Pelayanan Publik
7. Implementasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

8. "Justice for all" yang terdiri dari perkara prodeo, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Disamping itu Pengadilan Agama Pamekasan melaksanakan 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Berbasis IT)
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta Prilaku Hakim, berpedoman pada kode etik dan perilaku Hakim. Berdasarkan Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SK/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim maka Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim di Implementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

1. Berperilaku adil
2. Berperilaku jujur
3. Berperilaku arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri
5. Berintegritas tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Menjunjung tinggi harga diri

8. Berdisiplin tinggi
9. Berperilaku rendah hati
10. Bersikap profesional

C. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan, beberapa rencana strategis telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan diantaranya adalah :

1. Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel.
2. Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
3. Mewujudkan penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.
5. Mewujudkan pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien.
6. Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
7. Mewujudkan tersediannya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi Peradilan.
8. Mewujudkan SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi.

Selain rencana strategis tersebut di atas guna mewujudkan Modernisasi Peradilan serta terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, Pengadilan Agama Pamekasan menyiapkan langkah-langkah strategis lainnya:

1. **Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia** yaitu dengan mengikut sertakan seluruh aparat Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengikuti seminar, sosialisasi, pelatihan, pendidikan dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat Peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan;
2. **Membangun Budaya Kerja Profesional** yaitu dengan menghilangkan kesan Pintar Goblok Penghasilan Sama (PGPS). Adapun cara menghilangkan kesan tersebut Pengadilan Agama Pamekasan akan menegakkan kedisiplinan dengan mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus bagi Hakim dan Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta mengacu kepada SOP (Standart Operasional Procedur) dan Standart Pelayanan Peradilan, begitu juga Pengadilan Agama Pamekasan akan menindak aparatnya yang dinilai dan terbukti melanggar kedisiplinan dan memberikan sanksi sesuai Undang-Undang Kepegawaian. Sedang kepada aparat yang berprestasi, Pengadilan Agama Pamekasan akan memberikan penghargaan (Reward), hal ini untuk memacu aparat yang lain berlomba-lomba berprestasi.
3. **Pemanfaatan Tehnologi Informasi** yaitu meningkatkan akses publik melalui website yang di miliki Pengadilan Agama Pamekasan sehingga kebutuhan publik akan informasi mengenai status perkara, mengenai biaya perkara, alur perkara, putusan, struktur organisasi pengadilan, standar prosedur berperkara serta informasi lainnya menjadi mudah dan murah. Hal ini juga

untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aparat ataupun masyarakat yang nakal menjadi "calo perkara". Selain itu pula Pengadilan Agama Pamekasan juga membuat inovasi-inovasi, baik berbasis Aplikasi maupun non Aplikasi di tahun 2021, guna mendukung terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, seperti :

Berbasi Aplikasi :

1. E-bumu (Elektronik Buku Tamu)
2. Sitipeka (Sistem Informasi Terpadu Instansi Pengadilan Agama Pamekasan)
3. Lacak (Layanan Akta Cerai Antar Rumah)
4. Pacar (Penerima Akta Cerai Kenali Rupa)
5. Sipakar (Aplikasi Panjar Perkara)
6. Asmara (Aplikasi Manajemen Surat)

Non Aplikasi

1. Pamor (Pemutaran Audio Murrotal)
4. **Menjaga Kemandirian Badan Peradilan** yaitu Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah

mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual / fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

- 5. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan** yaitu Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Pamekasan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka

menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Pamekasan selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

6. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan yaitu kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan yang dipimpinya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan menitik beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

7. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan yaitu Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan merupakan Faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan

sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.



BAB II KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Pamekasan telah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sesuai dengan kewenangannya selama tahun 2021 sebanyak 2548 perkara dengan rincian sebagai berikut:

- **Keadaan Perkara Tingkat Pertama**

Sisa perkara Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2020 sebanyak 189 perkara, yang terdiri atas perkara gugatan sebanyak 169 perkara dan permohonan sebanyak 20 perkara. Sedangkan perkara yang diterima pada tahun 2021 sebanyak 2359 perkara, yang terdiri dari perkara gugatan sebanyak 1510 perkara dan perkara permohonan sebanyak 849 perkara.

No.	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2020	Diterima tahun 2021	Jumlah
1	Izin Poligami	1	1	2
2	Pencegahan Perkawinan			
3	Penolakan Perkawinan			
4	Pembatalan Perkawinan			
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri			
6	Cerai Talak	61	549	610
7	Cerai Gugat	103	940	1043
8	Harta Bersama		1	1
9	Penguasaan Anak	1	5	6
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu			
11	Hak - hak bekas istri/kewajiban			

	bekas Suami			
12	Pengesahan Anak			
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua			
14	Perwalian	2	33	35
15	Pencabutan Kekuasaan Wali			
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan			
17	Ganti Rugi terhadap Wali			
18	Asal Usul Anak		1	1
19	Perkawinan Campuran			
20	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	13	421	434
21	Izin Kawin			
22	Dispensasi Kawin	3	324	327
23	Wali Adhol	1	8	9
24	Kewarisan	3	7	10
25	Wasiat			
26	Hibah			
27	Wakaf			
28	Lain-Lain		7	7
29	Ekonomi Syariah			
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	1	62	63
Jumlah		189	2359	2548

Pada tahun 2021 perkara khusus yang menyangkut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian maupun Poligami harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin perceraian maupun izin poligami dari atasannya yang secara prosedural sudah diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin/surat keterangan dari Pejabat yang berwenang sebanyak 46 perkara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Cerai Talak	11
2	Cerai Gugat	35
Jumlah		46

- **Keadaan Perkara Tingkat Banding**

Perkara yang dimohonkan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2021 sebanyak 8 perkara, terdiri dari sisa perkara tahun 2020 sebanyak 0 perkara dan perkara yang diterima pada tahun 2021 sebanyak 8 perkara, telah diputus sebanyak 5 perkara. Adapun rincian perkara yang mengajukan permohonan upaya hukum banding sebagai berikut:

No.	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal	
			Diterima	Diputus
1	2	3	4	5
1	1274/Pdt.G/2020/PA.Pmk	Cerai Gugat	10/02/2021	30/03/2021
2	1371/Pdt.G/2020/PA.Pmk	Cerai Gugat	01/03/2021	26/04/2021
3	99/Pdt.G/2021/PA.Pmk	Cerai Gugat	20/04/2021	09/06/2021
4	1288/Pdt.G/2020/PA.Pmk	Kewarisan	07/06/2021	06/09/2021
5	760/Pdt.G/2021/PA.Pmk	Cerai Talak	07/09/2021	16/11/2021
6	345/Pdt.G/2021/PA.Pmk (Sudah dikirim)	Kewarisan	08/11/2021 15/11/2021	
7	899/Pdt.G/2021/PA.Pmk (Belum dikirim)	Cerai Talak	02/12/2021	
8	409/Pdt.G/2021/PA.Pmk (Belum dikirim)	Kewarisan	17/12/2021	

- **Keadaan Perkara Tingkat Kasasi**

Perkara yang dimohonkan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tahun 2021 sebanyak 5 perkara, terdiri dari sisa perkara tahun 2020 sebanyak 3 perkara, 2 (dua) perkara diputus tahun 2020 namun berkas diterima pada tahun 2021 dan 1 perkara diputus tahun 2021, perkara yang diterima pada tahun 2021 sebanyak 2 perkara. Adapun rincian perkara yang masih dalam proses upaya hukum Kasasi sebagai berikut:

No.	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal	
			Diterima	Diputus
1	2	3	4	5
1	495/Pdt.G/2019/PA.Pmk	Cerai Talak	23/01/2020	02/07/2020
2	1355/Pdt.G/2019/PA.Pmk	Cerai Talak	19/03/2020	28/08/2020
3	103/Pdt.G/2020/PA.Pmk	Cerai Talak	02/09/2020	09/04/2021
4	1371/Pdt.G/2020/PA.Pmk	Cerai Gugat	11/05/2021	-
5	99/Pdt.G/2021/PA.Pmk	Cerai gugat	06/07/2021	-

- **Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK)**

Perkara yang dimohonkan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI pada tahun 2021 sebanyak 0 perkara, terdiri dari sisa perkara tahun 2020 sebanyak 0 perkara, perkara yang diterima pada tahun 2021 sebanyak 0 perkara. Adapun rincian perkara upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai berikut:

No.	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2020	Diterima Tahun 2021	Jumlah (3+4)	Sisa Tahun 2021
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Jumlah		NIHIL			

B. PENYELESAIAN PERKARA

- **Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus**

Sisa perkara tahun 2020 yang harus diselesaikan tahun 2021 sebanyak 189 perkara ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2021 dapat diselesaikan sebanyak 2359 perkara, maka jumlah keseluruhan perkara terselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 2451 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2021 sebanyak 97 perkara, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sisa Tahun 2020	Diterima Tahun 2020	Jumlah (2+3)	Putus						Jumlah (5+6+7+8+9+10)	Sisa Tahun 2021
				Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret Dari Register		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	189	2359	2548	133	2264	7	16	23	8	2451	97

- **Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu**

Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan merupakan perkara yang diterima tahun berjalan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan. Berikut detail perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan:

Sisa Tahun 2020	Diterima Tahun 2021	Jumlah	Diputus < 5 bulan	Diputus > 5 Bulan	Sisa
1	2	3	4	5	6
189	2359	2548	2437	14	97

Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan berjumlah 2437 perkara. Beberapa hal yang menyebabkan tidak selesainya perkara lebih dari 5 bulan adalah sebagai berikut :

1. Adanya perceraian yang Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohonnya berstatus PNS/ TNI sehingga diperlukan surat izin perceraian dari atasan;
2. Adanya perkara kewarisan yang pihak Termohonnya lebih dari 5 s/d 10 orang dan alamatnya berada di luar daerah;
3. Adanya perkara tabayun yang beralih ke perkara ghoib.

- **Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK)**

Perkara yang tidak diajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) merupakan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lebih lanjut. Berikut jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2020:

Diputus Tahun 2021	Upaya Hukum			Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
	Banding	Kasasi	PK	
1	2	3	4	5
2451	5	2	0	2444

Berikut rincian perkara yang mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2021 :

No.	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal	
			Diterima	Diputus
1	2	3	4	5
1	99/Pdt.G/2021/PA.Pmk (sudah diputus)	Cerai Gugat	20/04/2021	09/06/2021
2	760/Pdt.G/2021/PA.Pmk (sudah diputus)	Cerai Talak	07/09/2021	16/11/2021

3	345/Pdt.G/2021/PA.Pmk (Sudah dikirim)	Kewarisan	08/11/2021 15/11/2021	
4	899/Pdt.G/2021/PA.Pmk (Belum dikirim)	Cerai Talak	02/12/2021	
5	409/Pdt.G/2021/PA.Pmk (Belum dikirim)	Kewarisan	17/12/2021	

Berikut rincian perkara yang mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2021 :

No.	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal	
			Diterima	Diputus
1	2	3	4	5
1	1371/Pdt.G/2020/PA.Pmk (belum diputus)	Cerai Gugat	11/05/2021	-
2	99/Pdt.G/2021/PA.Pmk (belum diputus)	Cerai gugat	06/07/2021	-

Berikut rincian perkara yang mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2021 :

No.	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal	
			Diterima	Diputus
1	2	3	4	5
1				
2	NIHIL			
3				

- **Jumlah Perkara yang Berhasil Dimediasi**

Perkara perdata yang dimediasi pada Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2021 sebanyak 178 perkara, adapun rincian mediasi sebagai berikut:

Mediasi	Jumlah
---------	--------

Tidak Berhasil	Berhasil	Masih Dalam Proses	
166	2	10	178

- **Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi**

Tidak ada perkara anak yang berhasil melalui diversi pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Pamekasan.

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

- **Pos Bantuan Hukum (Posbakum)**

Pos bantuan Hukum (Posbakum) merupakan lembaga pemberian jasa dan Hukum yang difasilitasi Negara yang berada di Pengadilan Agama, yang bertugas memberikan bantuan Hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Penyedia Jasa dan Layanan Hukum posbakum dapat berasal dari Advokat sarjana hukum dan syariah yang tergabung dalam lembaga profesi Advokat maupun LBH perguruan Tinggi sebagaimana diatur di dalam Keputusan SEKMA nomor 1 tahun 2014. adapun Layanan Hukum meliputi informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan bantuan hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, jo SEMA nomor 10 Tahun 2010 dan Perma No.1 Tahun 2014, Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2020 telah bekerja sama dengan **Pos Bantuan Hukum "Justitia" Pamekasan** yang telah melalui uji seleksi dan kompetensi dengan alokasi pagu Anggaran Rp. 38.200.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu Rupiah) yang berasal dari Anggaran DIPA 005-04-401540/2021

Dari pagu yang ada tersebut dapat teralisasi sebesar Rp. 38.100.000,- atau 99.74 persen dengan jumlah Jam layanan posbakum sebanyak 382 jam

layanan sesuai dengan jam layanan Pengadilan Agama Pamekasan mulai pukul 08.00 Wib s.d 16.00 Wib (Senin-kamis)

- **Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu**

Maksud diadakannya penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan/sidang keliling yaitu untuk memberikan akses kepada masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor Pengadilan Agama Pamekasan untuk tetap dapat mengikuti jalannya sidang di tempat yang relatif terjangkau dari tempat tinggalnya. Dengan adanya pelaksanaan Sidang Diluar Gedung/Sidang Keliling ini diharapkan bisa tercapai tujuan dari penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, mengingat banyaknya wilayah Kecamatan yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan. Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Pamekasan mendapatkan anggaran Sidang Keliling/biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Adapun data Sidang Keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Pamekasan sebagai berikut:

No.	Tanggal	Banyaknya Perkara	Lokasi
1.	4 Juni 2021	17 Perkara	Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan
2.	19 November 2021	4 Perkara	Kantor Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
3.	17 Desember 2021	117 Perkara	Kantor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

- **Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014, fasilitas Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara hadir guna menanggung biaya proses berperkara di pengadilan, dan untuk tahun 2021 Pengadilan Agama Pamekasan mendapat anggaran biaya pembebasan biaya perkara sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Adapun rincian perkara prodeo sebagai berikut:

No.	Nomor Perkara	Jenis Perkara
1.	336/Pdt.P/2021/PA.Pmk	Pengesahan Nikah/Istbat Nikah
2.	337/Pdt.P/2021/PA.Pmk	Pengesahan Nikah/Istbat Nikah
3.	338/Pdt.P/2021/PA.Pmk	Pengesahan Nikah/Istbat Nikah
4.	363/Pdt.P/2021/PA.Pmk	Pengesahan Nikah/Istbat Nikah
5.	364/Pdt.P/2021/PA.Pmk	Pengesahan Nikah/Istbat Nikah
6.	376/Pdt.P/2021/PA.Pmk	Pengesahan Nikah/Istbat Nikah
7.	377/Pdt.P/2021/PA.Pmk	Pengesahan Nikah/Istbat Nikah
8.	378/Pdt.P/2021/PA.Pmk	Pengesahan Nikah/Istbat Nikah
9.	385/Pdt.P/2021/PA.Pmk	Dispensasi Kawin
10.	395/Pdt.P/2021/PA.Pmk	Pengesahan Nikah/Istbat Nikah

Dengan pagu yang sangat minim sekali sebenarnya masih banyak masyarakat yang sangat membutuhkan pembebasan biaya perkara, sehingga ketika pagu DIPA telah habis, Pengadilan Agama Pamekasan melakukan pembebasan biaya perkara secara murni (prodeo). Dan untuk ke depannya Pengadilan Agama Pamekasan akan berusaha untuk mengusulkan penambahan pagu anggaran untuk pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

BAB III

Sumber Daya Manusia

Komposisi SDM berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada wilayah Pengadilan Agama Pamekasan

No.	Nama	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Pendidikan
1	Drs. M. Shohih, S.H., M.H.	Ketua	Pembina Utama Muda IV/c	S2
2	Mashuri, S.Ag., M.H.	Wakil ketua	Pembina IV/a	S2
3	Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.	Hakim	Pembina Utama Muda IV/c	S1
4	Dra. Hj. Farhanah, M.H.	Hakim	Pembina Utama Muda IV/c	S2
5	Ismail, S.Ag., M.H.I.	Hakim	Pembina IV/a	S2
6	Sugianto, S.Ag.	Hakim	Pembina IV/a	S1
7	Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I.	Hakim	Penata III/c	S2
8	ST. Khodijah, S.H.	Panitera	Pembina IV/a	S1
9	Sudarmanto, S.H.	Sekretaris	Pembina IV/a	S1
10	Hery Kushendar, SH.	Panmud. Hukum	Penata Tk. I III/d	S1
11	Zainal Arifin, S.H.	Panmud. Gugatan	Penata Tk. I III/d	S1
12	R.A. Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., S.H.	Panmud. Permohonan		S1
13	Siti Halimah, S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan	Penata III/c	S1
14	Muzakki	Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Penata Tk. I III/d	SMA
15	Bambang Wahyudiono, S.H.	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata III/c	S1
16	H. Safiudin, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Pembina IV/a	S2
17	Abdul Rachman, S.H.	Panitera Pengganti	Penata Muda III/a	S1
18	Erna Wagiana	Jurusita Pengganti	Pengatur Muda Tk.I II/b	SMA
19	Chairul Imam	Teknisi Sarana dan Prasarana	Penata Tk. I III/d	SMA
20	Hj. Fitriatus Shoidah	Pengadministrasi Persuratan	Penata Tk. I III/d.	SMA
21	Jauhari	Pengadministrasi Hukum	Pengatur Muda II/a	SMA
22	Muhammad Ivan Setiawan, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Penata Muda III/a	S1
23	Ulfi Laili Amalia, A.Md.A.B.	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Pengatur, II/c	D3

1. Mutasi

Pada tahun 2021 telah dilakukan berbagai mutasi kepegawaian mutasi kenaikan pangkat, mutasi gaji berkala, mutasi jabatan intern, mutasi tempat tugas.

a. Mutasi kenaikan pangkat sebanyak 1 pegawai, dan telah terealisasi

Mutasi kenaikan pangkat Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021

No	Nama	Pangkat lama	Pangkat Baru
1.	Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.	Pembina Tk. I IV/b	Pembina Utama Muda IV/c

b. Mutasi kenaikan gaji berkala sebanyak 10 pegawai, dan telah terealisasi semua

Mutasi kenaikan Gaji Berkala Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021

No	Nama	Jabatan	Tahun KGB
1.	H. Moh. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H.	Wakil Ketua	2021
2.	Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.	Hakim	2021
3.	Drs. Ainurrofiq ZA.	Hakim	2021
4.	Sudarmanto, S.H.	Sekretaris	2021
5.	Muzakki	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	2021
6.	Siti Halimah, S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan	2021
7.	Jamaliyah, S.Ag.	Panitera Pengganti	2021
8.	Abdul Rachman, S.H.	Panitera Pengganti	2021
9.	Chairul Imam	Teknisi Sarana dan Prasarana	2021
10.	Farida Kumalasari, S.Pd.	Pengelola Barang Milik Negara	2021

- c. Mutasi Jabatan internal, pada tahun 2021 ada 3 mutasi jabatan internal di Pengadilan Agama Pamekasan

Mutasi Jabatan Internal
Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Zainal Arifin, S.H.	Panmud. Permohonan pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB	Panmud. Gugatan pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB
2.	R.A. Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., S.H	Panmud. Gugatan pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB	Panmud. Permohonan pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB
3.	Siti Halimah, S.H.	Kasubag. Perencanaan, TI dan Pelaporan pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB	Kasubag. Umum dan Keuangan pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB

- d. Mutasi tempat tugas adalah pegawai yang dimutasi keluar atau masuk ke Pengadilan Agama Pamekasan dan untuk tahun 2021 terdapat 9 orang pegawai mutasi masuk

Mutasi Tempat Tugas (Mutasi Masuk)
Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Mashuri, S.Ag., M.H.	Ketua pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kelas II	Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB
2.	Ismail, S.Ag., M.H.I.	Hakim pada Pengadilan Agama Gresik Kelas IB	Hakim pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB
3.	Sugianto, S.Ag.	Ketua pada Pengadilan Agama Fak-Fak Kelas II	Hakim pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B

4.	Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I.	Hakim pada Pengadilan Agama Kangean Kelas II	Hakim pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB
5	ST. Khodijah, S.H.	Panitera pada Pengadilan Agama Sampang Kelas IB	Panitera pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB
6	H. Safiudin, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Agama Ngawi Kelas IB	Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB
7	Bambang Wahyudiono, S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan pada Pengadilan Agama Sampang Kelas IB	Kasubag. Perencanaan, TI dan Pelaporan pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB
8	Muhammad Ivan Setiawan, S.Kom	-	CPNS / Pranata Komputer Ahli Pertama pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB
9	Ulfi Laili Amalia, A.Md.A.B.	-	CPPNS / Pengadministrasi Registrasi Perkara pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB

dan terdapat 6 pegawai mutasi keluar :

**Mutasi Tempat Tugas (Mutasi Keluar)
Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021**

No	Nama	Jabatan lama	Jabatan Baru
1.	H. Moh. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H.	Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B	Ketua pada Pengadilan Agama Bangkalan Kelas IB

2.	Drs. Ainurrofiq ZA.	Hakim pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B	Hakim pada Pengadilan Agama Bangkalan Kelas IB
3	Drs. H . Mat Busiril, M.H.	Panitera pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B	Panitera pada Pengadilan Agama Magetan Kelas IB
4	Jamaliyah, S.Ag.	Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB	Panitera Hukum pada Pengadilan Agama Sampang Kelas IB
5	Hodrianto	Kasubag Umum dan Keuangan pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB	Kasubag. Perencanaan, TI dan Pelaporan pada Pengadilan Agama Sampang Kelas IB
6	Farida Kumalasari, S.Pd.	Pengelola Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB	Pengelola Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Raha Kelas II

2. Promosi

Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi baik dalam pemerintahan maupun non pemerintah (swasta). Menurut Husein (2003) seseorang yang menerima promosi harus memiliki kualifikasi yang baik dibanding kandidat-kandidat yang lainnya. Terkadang jender pria wanita serta senioritas tua muda mempengaruhi keputusan tersebut. Hal inilah yang banyak diusahakan oleh kalangan pekerja agar bisa menjadi lebih baik dari jabatan yang sebelumnya ia jabat. Dan juga demi peningkatan dalam status social. Promosi merupakan kesempatan untuk berkembang dan maju yang dapat mendorong karyawan untuk lebih baik atau lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan.

Pelaksanaan Promosi Pejabat/Pegawai Pengadilan Agama Pamekasan pada Tahun 2021 terdapat 1 pegawai promosi Jabatan

Promosi Jabatan
Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021

No	Nama	Jabatan lama	Jabatan Baru
1.	Siti Halimah, S.H.	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Kasubag Umum dan Keuangan

3. Pensiun

Pengertian pensiun adalah batas usia seseorang bekerja secara produktif. Dilingkungan Peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama Pamekasan batas usia untuk dipensiunkan terdiri dari :

- Usia Pensiun Hakim 65 tahun
- Usia Pensiun Pejabat/Pegawai Kepaniteraan 60 Tahun
- Usia Pensiun Pejabat/Pegawai Kesekretarian 58 Tahun
- Usia Pensiun Staf 58 Tahun

di Pengadilan Agama Pamekasan pada Tahun 2021 ada 1 Pegawai yang sampai pada batas pensiun (NIHIL)

Namun terdapat 1 pegawai yang pensiun karena meninggal dunia

Pensiun Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021

No	Nama	Jabatan	Pensiun
1.	Norhafi	Jurusita	Meninggal Dunia

4. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

a. Diklat SDM Teknis Tahun 2021

No	Nama	Jabatan	Nama Diklat
1.	Zainal Arifin, S.H.	Panmud. Gugatan	Bimbingan Teknis Kepaniteraan dan Jurusita Peradilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2021
	Jamaliyah, S.Ag.	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Kepaniteraan dan Jurusita Peradilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2021

b. Diklat SDM Non Teknis Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT
1.	Drs. M. Shohih, S.H., M.H.	Ketua	Pembinaan dan Konsultasi Bidang Kesekretariatan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
2.	Sudarmanto, SH.	Sekretaris	BPembinaan dan Konsultasi Bidang Kesekretariatan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
3.	Muzakki	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Pembinaan dan Konsultasi Bidang Kesekretariatan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun Anggaran 2021
4.	Siti Halimah, S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan	Pembinaan dan Konsultasi Bidang Kesekretariatan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
5.	Bambang Wahyudiono, S.H.	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Pembinaan dan Konsultasi Bidang Kesekretariatan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
6.	Muhammad Ivan Setiawan, S.Kom	CPNS / Pranata Komputer Ahli Pertama	Latsar CPNS Distance Learning Melalui E-learning Gelombang I Golongan III Angkatan IV Tahun 2021
7.	Ulfi Laili Amalia, A.Md.A.B.	CPNS / Pengadministrasi Registrasi Perkara	Latsar CPNS Distance Learning Melalui E-learning Gelombang II Golongan II Angkatan VIII Tahun 2021

BAB IV

Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi Informasi

A. Pengelolaan Keuangan

Secara umum pengelolaan keuangan anggaran DIPA Tahun 2021 di Pengadilan Agama Pamekasan dilaksanakan dalam bentuk belanja yang terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan program peningkatan manajemen peradilan agama yang terdiri biaya prodeo dan pos bantuan hukum, Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) Program, yaitu : APBN dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) Program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung terdiri dari 2 (tiga) Jenis Belanja yang terdiri dari :

Belanja Pegawai

Belanja pegawai yakni kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain : untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi, dan lembur. Honorarium yang

berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

1. Pagu

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2021 yang diusulkan pada tahun 2021, untuk belanja pegawai Pengadilan Agama Pamekasan memerlukan dana sebesar Rp. 3.178.465.000,- dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2021, Pengadilan Agama Pamekasan untuk belanja pegawai mendapatkan pagu dana sebesar Rp. 3.178.465.000,- atau mencapai 100 %.

Selama tahun 2021 tersebut DIPA Belanja Pegawai Pengadilan Agama Pamekasan mengalami revisi sebanyak 1 kali, yaitu tentang revisi Belanja Pegawai yang minus yang mempengaruhi pagu belanja secara keseluruhan dimana pagu Awal sebesar Rp. 2.515.553.000 menjadi Rp. 3.178.465.000,- sehingga mengalami kenaikan Pagu sebesar Rp. 662.91.000,-

2. Realisasi

Dari pagu belanja pegawai Pengadilan Agama Pamekasan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2021 setelah revisi sebesar Rp. 3.178.465.000,- anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebesar Rp. 3.160.808.305,-

Dari total anggaran yang telah terealisasi tersebut di atas, maka

total pagu yang terserap sebesar 99,44%.

3. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima, dan anggaran yang telah terealisasi / terserap, maka dari total anggaran masih ada sisa sebesar Rp. 17.656.695,- atau mencapai (0,56%). Namun sisa tersebut bukan merupakan sisa dari uang persediaan (UP) yang harus dikembalikan karena dana tersebut belum diambil.

Secara keseluruhan Pagu, realisasi dan sisa Anggaran DIPA untuk Belanja Pegawai selama tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana Tabel dibawah ini :



Tabel : Belanja Pegawai tahun 2021

Kode	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran	Sisa Anggaran (%)
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	849.002.000	1.246.802.000	1.243.405.980	99,73%	3.396.020	0,27%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.000	20.000	16.097	80,49%	3.903	24,25%
511121	Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS	76.353.000	101.965.000	101.963.692	100,00%	1.308	0,00%
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	22.190.000	31.890.000	31.845.228	99,86%	44.772	0,14%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	43.960.000	36.460.000	36.400.000	99,84%	60.000	0,16%
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.051.190.000	1.284.490.000	1.284.490.000	100,00%	0	0,00%
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	174.989.000	173.989.000	173.961.248	99,98%	27.752	0,02%
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	60.466.000	68.466.000	68.292.060	99,75%	173.940	0,25%
511129	Belanja Uang Makan PNS	208.824.000	219.324.000	205.584.000	93,74%	13.740.000	6,68%
511151	Belanja Tunj Umum PNS	28.559.000	15.059.000	14.850.000	98,61%	209.000	1,41%
Jumlah		2.515.553.000	3.178.465.000	3.160.808.305	99,44%	17.656.695	0,56%

b. Belanja Barang

Belanja barang, yakni berupa pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang habis dipakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya adalah pemeliharaan dan perjalanan, sesuai dengan standart biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan R.I.

Perhitungan dari penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

1. Pagu

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2021 yang diusulkan pada tahun 2021 untuk belanja barang Pengadilan Agama Pamekasan memerlukan dana sebesar Rp. 1.358.326.000,- dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 tahun anggaran 2021, Pengadilan Agama Pamekasan untuk belanja barang mendapatkan dana anggaran sebesar Rp. 1.358.326.000,- atau mencapai 100 %.

Selama tahun 2021 tersebut Pagu Belanja Barang mengalami 2 kali revisi dan ada Perubahan pagu belanja secara keseluruhan.

2. Realisasi Anggaran

Dari pagu belanja barang Pengadilan Agama Pamekasan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.358.326.000,- anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp. 1.343.506.787,- atau mencapai 98,91%.

3. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima, dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka dari total anggaran belanja barang masih ada sisa sebesar Rp 14.819.213,- atau sebesar 1,10 % yakni sisa dari belanja Operasional, Belanja Keperluan Perkantoran, Belanja Jasa Listrik, Telepon dan indihome dan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. Belanja Barang pada tahun 2021 Pengadilan Agama Pamekasan

Secara keseluruhan Pagu, realisasi dan sisa Anggaran DIPA untuk Belanja Barang selama tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel : Belanja Barang Tahun 2021

Kode	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran	Sisa Anggaran (%)
002.A.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	563.400.000	563.400.000	563.400.000	100,00%	0	0,00%
002.A.521119	Belanja Barang Operasional lainnya	14.500.000	16.200.000	16.199.500	111,72%	500	0,00%
002.A.521811	Belanja Barang Persediaan	52.830.000	57.830.000	57.830.000	109,46%	0	0,00%
002.B.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	174.500.000	162.500.000	158.063.935	90,58%	4.436.065	2,81%
002.B.521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.600.000	3.600.000	3.597.500	99,93%	2.500	0,07%
002.B.522111	Belanja Langganan Listrik	62.400.000	74.100.000	67.685.160	108,47%	6.414.840	9,48%
002.B.522112	Belanja Langganan Telepon	696.000	696.000	682.995	98,13%	13.005	1,90%
002.B.522113	Belanja Langganan Air	3.600.000	3.600.000	3.600.000	100,00%	0	0,00%
002.B.522141	Belanja Sewa	47.520.000	47.520.000	47.520.000	100,00%	0	
002.C.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Perkantoran	113.740.000	173.140.000	173.100.000	152,19%	40.000	0,02%
002.C.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120.240.000	125.040.000	125.020.435	103,98%	19.565	0,02%
002.D.521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	33.000.000	33.000.000	33.000.000	100,00%	0	0,00%
002.D.521119	Belanja Operasional lainnya	11.200.000	28.250.000	28.250.000	252,23%	0	0,00%
002.E.521119	Belanja Operasional lainnya untuk Pelantikan dan Sumpah	9.750.000	9.750.000	9.723.000	99,72%	27.000	0,28%
002.F.524111	Belanja Perjalanan Biasa	34.200.000	39.600.000	39.483.000	115,45%	117.000	0,30%
002.F.524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	6.300.000	900.000	900.000	14,29%	0	0,00%
002.G.521211	Belanja Bahan Rapat Koordinasi Internal	9.600.000	5.000.000	4.925.000	51,30%	75.000	1,52%
002.H.524111	Belanja Perjalanan Biasa	7.200.000	7.200.000	7.200.000	100,00%	0	0,00%
002.I.521131	Belanja Barang Operasional-Penanganan Covid 19	2.000.000	6.350.000	2.676.262	133,81%	3.673.738	137,27%
003.A.521241	Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Covid	5.000.000	650.000	650.000	13,00%	0	0,00%
Jumlah		1.275.276.000	1.358.326.000	1.343.506.787	98,91%	14.819.213	1,10%

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung terdiri dari Belanja Modal. Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal.

Untuk tahun anggaran 2021, Pengadilan Agama Pamekasan ada belanja modal.

a. Pagu

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2021 yang diusulkan pada tahun 2021 untuk belanja Modal Pengadilan Agama Pamekasan memerlukan dana sebesar Rp.37.500.000,- dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 tahun anggaran 2021, Pengadilan Agama Pamekasan untuk belanja barang mendapatkan dana anggaran sebesar Rp.37.500.000,-

Selama tahun 2021 tersebut Pagu Belanja Modal tidak mengalami revisi.

b. Realisasi Anggaran

Dari pagu belanja modal Pengadilan Agama Pamekasan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2021 sebesar Rp.37.500.000,- anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah ditebitkan sebesar Rp.37.500.000,- atau mencapai 100,00 %

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima, dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka dari total anggaran belanja barang masih tidak ada sisa sebesar Rp 0,- atau sebesar 0,00%

Belanja Modal pada tahun 2021 Pengadilan Agama Pamekasan secara keseluruhan dapat dilihat sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel : Belanja Modal tahun 2021

Kode	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran	Sisa Anggaran (%)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.500.000	37.500.000	37.500.000	100,00%	0	0,00%
Jumlah		37.500.000	37.500.000	37.500.000	100,00%	0	0,00%

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

untuk program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Pengadilan Agama Pamekasan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun anggaran 2021 sebesar Rp 55.700.000,-.

a. Pagu DIPA

Besarnya anggaran atau pagu belanja Dana Peningkatan manajemen Peradilan Agama dalam DIPA Tahun Anggaran 2021 yang telah diterima oleh Pengadilan Agama Pamekasan adalah Rp. 55.700.000,-

b. Realisasi Anggaran

Dari pagu belanja Dana Peningkatan manajemen Peradilan Agama dalam DIPA Tahun Anggaran 2021, anggaran yang telah terserap atau terealisasi adalah Rp.55.599.000,-

Dari total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja Dana Peningkatan manajemen Peradilan Agama telah terserap sebesar 99,82%

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa anggaran sebesar Rp. 101.000,-

Total sisa anggaran dari pagu belanja Dana Peningkatan manajemen Peradilan Agama sebesar 0,27 % dari total pagu yang tersedia.

Belanja Dana Peningkatan manajemen Peradilan Agama dalam DIPA Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan dengan rincian dapat dilihat sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel : Belanja Barang 04 tahun 2021

Kode	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran	Sisa Anggaran (%)
1053.QBA.001	Bantuan Pembebasan Biaya Perkara						
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00%	0	0,00%
1053.QBA.002	Biaya penyelesaian perkara diluar gedung Pengadilan						
522141	Beban Sewa	4.820.000	4.820.000	4.820.000	100,00%	0	0,00%
524113	Biaya Perjalanan Transport dalam Kota untuk biaya	8.680.000	8.680.000	8.679.000	99,99%	1.000	0,01%
1053.QBA.003	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum						
522131	Beban Jasa Konsultan	38.200.000	38.200.000	38.100.000	99,74%	100.000	0,26%
	Jumlah	55.700.000	55.700.000	55.599.000	99,82%	101.000	0,27%



B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama Pamekasan, maka perlu ditunjang oleh ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana kantor yang memadai dan dalam pelaksanaannya harus dikelola dan diadministrasikan secara tertib, karena sarana prasarana kantor tersebut merupakan aset milik negara yang penggunaan dan pengelolaannya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pengadilan Agama Pamekasan dalam Tahun 2021 telah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kantor diantaranya :

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Sarana dan Prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara yang terdiri dari tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara permanen.

Adapun pengelolaannya tersebut di Pengadilan Agama Pamekasan meliputi:

- a. Pelaksanaan OFBI tanah dan bangunan kantor permanen telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Pamekasan;
- b. Pengadministrasian tanah dan bangunan kantor permanen ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);
- c. Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) bangunan Permanen;
- d. Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) tanah negara; dan

Sedangkan pengelolaan tanah, bangunan kantor permanen di Pengadilan Agama Pamekasan meliputi :

- Tanah untuk bangunan kantor yang dimiliki saat ini seluas 2.709 m² yang terdiri dari :
 1. Tanah Kantor Lama seluas 515 m² yang terletak di Jalan Kabupaten 126 Pamekasan;
 2. Tanah Kantor Baru seluas 2.194 m² yang terletak di Jalan Raya Tlanakan Pamekasan.
- Bangunan Kantor permanen dengan total luas bangunan 1.253 m², yang terdiri dari :
 1. Bangunan Gedung Kantor Permanen Kantor Lama seluas 250 m² yang terletak di Jalan Kabupaten 126 Pamekasan;
 2. Bangunan Gedung Kantor Permanen Kantor Baru seluas 1.003 yang terletak di Jalan Raya Tlanakan Pamekasan

Saat ini beberapa bagian dalam kondisi rusak dan membutuhkan pemeliharaan.

Pengadaan sarana dan prasarana gedung meliputi pembangunan/ pengembangan, rehabilitasi pada barang milik negara pada Pengadilan Agama Pamekasan pada Tahun 2021 tidak ada dengan tabel sebagai berikut:

Tabel : Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi

Tahun 2021

No	Satuan kerja	Luas (m2)	Nilai pengadaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengadilan Agama Pamekasan	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pengadilan Agama pamekasan Tahun 2021 mendapatkan Pemeliharaan Sarana dan prasarana pada yang terdiri dari Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel : Kegiatan Pemeliharaan Tahun 2021

No	Satuan kerja	Jenis pemeliharaan	Luas	Nilai pemeliharaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengadilan Agama Pamekasan	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,194 m ²	Rp. 173.140.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	Rp. 125.040.000

3. Penghapusan

Pengadilan Agama Pamekasan pada Tahun 2021 tidak ada penghapusan Barang Milik Negara sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel : Penghapusan Tahun 2021

No	Satuan kerja	No. Bast / tanggal	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengadilan Agama Pamekasan	NIHIL	NIHIL

4. Belanja Modal

Pengadilan Agama Pamekasan pada Tahun 2021 ada Belanja Modal berupa :

1. Pengadaan Alat Pengolah Data Pendukung Kepaniteraan yaitu Pengadaan PC. Unit sebanyak 2 Unit

Adapun belanja modal tahun 2021 sesuai dengan tabel berikut :

Tabel : Belanja Modal Tahun 2021

No	Satuan kerja	Nama pengadaan	Jumlah	Nilai pengadaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengadilan Agama Pamekasan	1. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP - PC untuk kepaniteraan	3 Unit	Rp. 37.500.000

5. Penetapan Status Penggunaan.

Penetapan Status Penggunaan barang milik negara Pada Pengadilan Agama Pamekasan yang terdiri dari Penetapan status Tanah, gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin. Pada Tahun 2021 Pengadilan Agama Pamekasan tidak ada penetapan status penggunaan karena sudah dilakukan pada tahun sebelumnya sesuai dengan tabel berikut :

Tabel : Penetapan Status Penggunaan Tahun 2021

No	Satuan kerja	No. Bast / tanggal	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengadilan Agama Pamekasan	NIHIL	NIHIL

6. Transfer Masuk

Pengadilan Agama Pamekasan pada Tahun 2021 mendapatkan BMN transfer masuk sesuai dengan tabel berikut :

Tabel : Tranfer Masuk Tahun 2021

No	Satuan kerja	Nama barang	Asal	No. Bast / tanggal	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadilan Agama Pamekasan	Monografi	BUA MA-RI	37/SPK/PP /BUA.6/6/2021	190.000

7. Transfer Keluar

Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2021 tidak ada Transfer Keluar Barang Milik Negara sesuai dengan tabel berikut :

Tabel : Transfer Keluar Tahun 2021

No	Satuan kerja	Nama barang	Asal	No. Bast / tanggal	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadilan Agama Pamekasan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi informasi sudah menjadi sarana pendukung yang penting dalam membantu pelaksanaan tugas sehari-hari. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi demi melaksanakan keterbukaan informasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan telah terwujud dengan adanya situs resmi Pengadilan Agama Pamekasan, sehingga masyarakat pencari keadilan dapat mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pamekasan sebagai bentuk keterbukaan informasi.

Segala hal mengenai informasi perkara, transparansi keuangan, profil pegawai dan pengadilan, telah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat di domain <https://pa-pamekasan.go.id/> sebagai perwujudan pelayanan publik yang diberikan oleh Pengadilan Agama Pamekasan.

- **Implementasi E-Court**

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, maka setiap Pengadilan wajib menggunakan e-court dalam penerimaan perkara, e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

- ✓ e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- ✓ e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- ✓ e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- ✓ e-Litigation (Persidangan secara online)

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Pamekasan telah menerima perkara melalui e-court sebanyak 593 perkara, adapu rincian perkara yang diajukan melalui E-Court sebagai berikut:

Sisa Tahun 2020	Diterima Tahun 2021	Dicabut	Diputus			Sisa E-Court Tahun 2021
			Secara Elektronik	Secara Biasa	Jumlah	
65	593	59	3	570	573	26

- **Implementasi SIPP**

Implementasi Administrasi Yudisial dari sistem konvensional ke sistem digital telah dimulai sejak tahun 2016 yang lalu sebelum diberlakukan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berbasis digital di lingkungan peradilan, sejak terbitnya Instruksi Direktur Jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah

Agung RI Nomor 0458/DJA/HK.02.3/2/2016 tanggal 11 Februari 2016, perihal Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan.

Revolusi total Implementasi Admintrasi Yudisial secara digital di Lingkungan Peradilan Agama dimulai sejak terbitnya Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0424/DJA/HM.00/II/2019, tanggal 11 Februari 2019 perihal "Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara Elektronik pada Peradilan Agama". Sejak saat itu, regiser manual tidak dicetak lagi, dan harus beralih ke registrasi elektronik berbasis Aplikasi SIPP.

Langkah Dirjen Badilag tersebut, menginspirasi Dirjen Badan Peradilan lain, dan pada tanggal 27 Juli 2020 Revolusi total tentang Implementasi administrasi yudisial pengadilan tingkat pertama dan banding di empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI dari era Konvensional ke era Digital dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara resmi diberlakukan menyeluruh dengan ditandai dengan terbitnya Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1188/SEK/HM.02.3/7/2020, tanggal 27 Juli 2020 tentang Rilis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding di seluruh Indonesia.

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai bagian dari Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama, sejatinya sejak instruksi Dirjen Badan Peradilan Agama tersebut, telah mengImplementasikan SIPP, dimulai dari sosialisasi SIPP, Uji Coba Implementasi SIPP, dan Implementasi SIPP mulai dari bisnis proses menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara semuanya telah diadministrasikan secara elektronik berbasis aplikasi SIPP.

Secara umum Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Pamekasan sudah berjalan dengan baik sesuai program dan target, perekaman data perkara sudah tertib sesuai dengan kejadian objektif secara *real time* yang dijalankan sesuai tugas dan fungsi masing-masing pengguna. Hal ini dapat dibuktikan dengan data SIPP bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 prosentase penanganan perkara mencapai angka 96.19%.



Peningkatan Pelayanan Publik

1. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Dalam rangka peningkatan layanan kepada Para Pencari Peadilan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iah telah dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan Akreditasi Penjaminan Mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik dalam pelayanan Administrasi Manajemen, Kesekretariatan dan Kepaniteraan. Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iah.

Di dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut maka Pengadilan Agama Pamekasan juga telah melakukan upaya – upaya perbaikan di Segala unit. Pengadilan Agama Pamekasan terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang nantinya akan berdampak ada peningkatan efisiensi, efektifitas, serta produktifitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta memiliki Standar Pelayanan yang sesuai dengan kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara sisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan atau inovasi – inovasi Pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan.

Sesuai dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah melakukan kebijakan yaitu : Akreditasi sertifikat ISO serta lomba inovasi pelayanan Publik antar satuan kerja diseluruh Pengadilan di Indonesia. Pengadilan merupakan salah satu pelaksana dalam penegak hukum harus terus menerus memperbaiki dan memberikan pembaruan atau inovasi dalam sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, dimana salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah

Agung yaitu SK KMA 1-144 tentang Pedoman Pelayanan informasi di pengadilan dan SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dimana pelayanan prima harus terus ditingkatkan. Pengadilan Agama Pamekasan dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan dan bermutu guna tercapainya pelayanan publik yang prima. Untuk itu diperlukan sistem manajemen mutu yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan dalam memenuhi kebutuhan publik sesuai dengan peraturan yang ada.

Didalam memenuhi dan mencapai standar pelayanan yang prima maka diperlukan suatu proses Sertifikasi atau Akreditasi Penjaminan Mutu yang nantinya dijadikan acuan apakah Pelayanan di Pengadilan Agama Pamekasan sudah sesuai standar atau belum. Melalui proses sertifikasi, untuk Tahun 2021 di Pengadilan Agama Pamekasan telah dilaksanakan Aseesmen Surveillance II Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, mulai dari Pengiriman Dokumen Aseesmen APM, menyelesaikan Permintaan Perbaikan Hasil Telusur Dokumen APM sampai pelaksanaan Observasi Implementasi APM dan Pengadilan Agama Pamekasan telah menyelesaikan Permintaan Perbaikan Hasil Observasi Implementasi APM ke Tim APM Ditjen Badilag, semoga Pengadilan Agama Pamekasan dapat mempertahankan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu dengan “**A-Excellent**”.

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Pengadilan Agama Pamekasan

RUANG LINGKUP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung di samping program akreditasi. Program ini mulai dikenalkan sejak Tahun 2017 di beberapa pengadilan umum pada Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, program tersebut dilaksanakan hampir diseluruh pengadilan di Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 menyebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi

dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya Pengadilan.

Program PTSP sendiri terbentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat terjadi di berbagai lembaga peradilan Indonesia, hal ini selaras dengan tujuan PTSP yang tertuang dalam surat keputusan Dirjen Badilag. Dengan adanya PTSP diharapkan para pihak berperkara dan yang bukan berperkara hanya dapat berinteraksi dengan pihak pengadilan di bagian depan (*frontliner*) untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan mencegah terjadinya interaksi lebih yang dapat menjurus kepada hal hal yang bersifat koruptif.

PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

TUJUAN

PTSP bertujuan:

- a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

PRINSIP

PTSP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Keterpaduan;
- b. Efektif, Efisien, Ekonomis;

- c. Koordinasi;
- d. Akuntabilitas; dan
- e. Aksesibilitas.

Pengadilan Agama Pamekasan merupakan salah satu dari beberapa tempat pelayanan yang ada di daerah Pamekasan saat sudah mempunyai tempat pelayanan yang sangat memadai untuk melayani para pencari keadilan dengan maksimal seperti gambar dibawah ini ;



Pengadilan Agama Pamekasan telah menggunakan layanan konvensional dalam melayani pihak berperkara ataupun bukan yang berperkara. Dan secara resmi diimplementasikan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019. Segala bentuk pelayanan Pengadilan Agama Pamekasan, di proses di meja layanan Terpadu satu pintu (PTSP).

Pelayanan yang ada di ruang PTSP Pengadilan Agama Pamekasan terdiri dari :

- Pojok Ecourt
- Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan
- Meja I / Layanan Pendaftaran
- Meja II / Layanan Pembayaran Biaya Perkara
- Meja III / Layanan Pengambilan Produk Pengadilan
- Petugas Posbakum
- Petugas Bank
- Petugas Pos.

Prosedur

Adapun prosedur Pelayanan dimulai dari Petugas Keamanan (Satpam) mengarahkan ke ruang PTSP selanjutnya orang berperkara mengambil kartu antrean yang terdiri dari kartu antrean sidang, kartu antrean pendaftaran dan kartu antrean produk pengadilan (pengambilan Putusan/ Penetapan dan Akta cerai), bagi yang memegang kartu antrean pendaftaran dan kartu antrean pengambilan Putusan / Penetapan dan Akta cerai masuk menghadap ke petugas Pelayanan Meja Informasi untuk diarahkan. Bagi yang memegang kartu antrean pendaftaran diarahkan ke meja 1 terus ke Petugas Bank selanjutnya ke Ke Kasir dan Ke petugas Meja II dan pendaftaran selesai selanjutnya pada waktu yang telah ditentukan para berperkara di panggil oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk bersidang dan selanjutnya orang berperkara bisa mengambil hasil dari persidangan Putusan atau penetapan di Meja III yang semuanya itu ada di ruang PTSP. Adapun Prosedur pelayanan di PTSP di Pengadilan Agama Pamekasan sebagai gambar berikut :



Tujuan

PTSP bertujuan:

- a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Prinsip

PTSP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Keterpaduan;
- b. Efektif, Efisien, Ekonomis;
- c. Koordinasi;
- d. Akuntabilitas; dan
- e. Aksesibilitas.

Tentunya pelaksanaan program ini menambah daftar Pengadilan Agama yang memberikan pelayanan prima untuk masyarakat sebagai wujud pembenahan Lembaga Peradilan di Indonesia yang bersih dan bebas korupsi. Semoga ke depan lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia yang Agung seperti visi besar Mahkamah Agung.

3. Inovasi Pelayanan Publik

Era baru peradilan modern sudah dimulai pada 2008 lalu, hal ini sebagai revolusi dalam mengubah cara kerja agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan. Badan Peradilan Agama dengan segala inovasinya menunjukkan bahwa mereka siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

Tahun 2021 Pengadilan Agama Pamekasan telah melakukan beberapa inovasi terkait dengan pemberian layanan yang prima kepada publik, baik yang berhubungan dengan sarana prasarana maupun yang berhubungan dengan teknologi informasi.

Sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, Pengadilan Agama Pamekasan memberikan kemudahan-untuk masyarakat ketika berada di Pengadilan Agama Pamekasan, antara lain adanya petunjuk arah kepada pihak berperkara, alur berperkara, fasilitas disabilitas, tempat parkir, smoking area, ruang bermain anak dan ruang tunggu sidang yang memadai. Serta 7 inovasi

pelayanan publik baik berbasis aplikasi (E-bumu, Sitipeka, Lacak, Pacar, Sipakar, Asmara) maupun non aplikasi seperti Pamor (Pemutaran Audio Murottal) yang telah dilanching pada tanggal 26 Nopember 2021, hal tersebut diatas selaras untuk mendukung Surat Badilag Pada tanggal 15 Juli 2019, Dirjen Badilag mengeluarkan surat bernomor: 3396/DjA/OT.02.1/VII/2019 perihal Uji Coba 9 (Sembilan) Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Agama. 9 Aplikasi ini dikembangkan untuk menopang kebijakan resmi Mahkamah Agung tersebut, antara lain :

Adapun 9 inovasi tersebut yang diluncurkan yaitu:

1. Aplikasi notifikasi perkara
2. Aplikasi informasi perkara dan informasi produk pengadilan agama
3. Aplikasi antrian sidang
4. Aplikasi verifikasi data kemiskinan (kerja sama dengan AIPJ dan TNP2K)
5. Command centre Badilag
6. Aplikasi e- eksamninasi
7. Aplikasi PNBP
8. E-register perkara
9. E-keuangan perkara

Pada acara yang bertepatan dengan peringatan 30 tahun lahirnya Undang-Undang Peradila Agama, Ketua Mahkamah Agung selain meluncurkan secara resmi sembilan aplikasi unggulan juga meluncurkan secara resmi buku “Mewujudkan Peradilan Agama yang Agung” yang ditulis oleh hakim-hakim peradilan agama. “Peluncuran buku berjudul “Mewujudkan Peradilan Agama yang Agung”, selain mendorong budaya literasi warga peradilan, juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi utama tentang permasalahan yang dihadapi peradilan agama beserta solusinya, berharap bahwa semua inovasi ini bisa menjadi kebanggaan sekaligus menjadi pemacu semangat bagi semua pihak dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang kini telah dioptimalisasi implementasi 11 Aplikasi unggulan Dirjen Badilag yaitu:

1. Aplikasi notifikasi perkara
2. Aplikasi Informasi produk pengadilan
3. Aplikasi antrian sidang
4. Aplikasi basis data terpadu kemiskinan

5. Command centre Badilag
6. Aplikasi PNBP Fungsional
7. Aplikasi E - Eksaminasi
8. Aplikasi E-Register
9. Aplikasi E-Kuangan
10. Aplikasi Validasi akta Cerai
11. Aplikasi Gugatan mandiri

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai Peradilan Tingkat Pertama dalam inovasi pelayanan Publik mengikuti 11 Aplikasi unggulan dari Badilag untuk memperlancar Pelayanan di Pengadilan Agama Pamekasan.



Pengawasan

A. INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan, karena pengawasan itu intinya adalah pengendalian, dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu unsur manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh - sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan peradilan pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

1. Pengawasan Melekat

Didalam pengawasan melekat ini bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan represif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Di Pengadilan Agama Pamekasan pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Pamekasan dengan cara terus-menerus memantau/mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengadakan rapat-rapat pembinaan secara periodic, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan adalah Ketua Pengadilan. Oleh karena itu untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal ketua Pengadilan Agama Pamekasan telah menunjuk Hakim pengawas bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing- masing untuk melaksanakan pengawasan setiap semester dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan dengan tembusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang penunjukannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Nomor : W13-A29/1614/PS.01/SK/9/2021 tanggal

09 September 2021 tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang, yakni :

1. Mashuri, S.Ag., M.H. sebagai Wakil Ketua mempunyai tugas sebagai Koordinator Pengawasan.
2. Sugianto, S.Ag. sebagai Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik.
3. Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara (Pola Bindalmin).
4. Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan.
5. Dra. Hj. Farhanah, M.H. sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasikeuangan Perkara dan Keuangan DIPA.
6. Ismail, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian dan Umum.

2. Pengawasan Fungsional

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983. Adapun definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor: 01 tahun 1989 pada pedoman umum angka 1 huruf c adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama Pamekasan dalam melaksanakan tugas- tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengawas dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Pamekasan telah dilakukan pengawasan oleh :

- a) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R Nomor : 346/BP/ST/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Monitoring/Pembinaan kepada Pengadilan Agama Pamekasan atas Pemeriksaan Reguler yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan 20 Mei 2016 berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan

Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : 241/BP/ST/VI/2016 tanggal 11 Mei 2016 yang terdiri dari Tim Pemeriksa sebagai berikut:

- 1) Lindi Kusumaningtyas, Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah RI sebagai ketua.
- 2) M. Turchan Badri, Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah RI sebagai Anggota.
- 3) Nurdiansyah, Auditor Muda pada Badan Pengawasan Mahkamah RI sebagai Anggota.
- 4) Sanda Fajelius Hasibuan, Auditor Muda pada Badan Pengawasan Mahkamah RI sebagai Anggota.
- 5) Agustaja Tiyusandy, Pranata Komputer pada Badan Pengawasan Mahkamah RI sebagai Sekretaris.

b) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : W13-A/3983/PS.00/9/2021 tanggal 17 September 2020 tentang Pembinaan dan Pemeriksaan Teknis dan Administrasi Yustisial Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan oleh Pejabat dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari :

- 1) Drs. H. Sugito Musman, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Tim Pemeriksa.
- 2) H. Mukolili, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tim Pemeriksa.
- 3) Muhammad Sun'an, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tim Pemeriksa.
- 4) Rachmad Firman Kristanto, S.Mn., Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur ada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tim Pemeriksa.

- 5) Dhita Novia Widaningsih, S.Psi., Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur ada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tim Pemeriksa.

Pengawasan dimaksud untuk mengetahui sejauh mana Pengadilan Agama Pamekasan dalam tertib administrasi, administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan, kebersihan kantor, terselenggaranya manajemen Peradilan yang baik dan benar serta memberikan pembinaan secara langsung. Pengawasan tersebut sangatlah berarti karena kinerja Pengadilan Agama Pamekasan bisa diukur dari hasil Pengawasan tersebut dan secara langsung bisa diketahui kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan tugas, walaupun tentunya masih ada kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki.

Sebagaimana surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2014, Nomor: 248/BUA/KU.01/10/2014 tentang pelaksanaan Pemeriksaan terinci atas Pengelolaan Keuangan Perkara dan Kinerja Pelayanan Peradilan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan oleh Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan RI. Hal ini tentunya sangat bermanfaat untuk mengukur seberapa kinerja Badan Peradilan sehingga hasilnya kedepan akan lebih terukur dalam mencapai target.

3. Pengawasan Rutin

Pengadilan Agama Pamekasan dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap masing-masing Pejabat/bagian terkait dilakukan baik langsung oleh Ketua Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Hakim pengawas Mahkamah Agung RI.

Didalam pengawasan rutin ini Ketua Pengadilan Agama Pamekasan juga membuka pengaduan masyarakat melalui kotak saran, meja pengaduan, email pa.pmk126@gmail.com, website, whatsapp, instagram dan Siwas dengan tujuan untuk memperbaiki pelayanan maupun meningkatkan etos kerja pegawai.

Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai diatas sebagai upaya meningkatkan disiplin pegawai, absensi yang digunakan memakai fingerprint maupun manual sehingga baik kedatangan maupun pulangny pegawai bisa

dilihat dari absensi manual secara langsung dan dicocokkan dengan hasil print out setiap bulan, sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 dan SK Sekretaris MARI Nomor : 35/SK/IX/2008.



B. EVALUASI

Sebagai realisasi dari fungsi pengawasan, Pengadilan Agama Pamekasan telah mengadakan upaya Evaluasi sebagaimana tindak lanjut dari surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dengan langkah- langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan sosialisasi kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Pamekasan tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Tugas Pengawasan. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 145/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Badan-Badan Peradilan.
2. Mengadakan sosialisasi tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim.
3. Mengadakan sosialisasi hasil rapat pembinaan, rapat kerja daerah dan rapat kerja nasional baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Hakim Pengawas bidang yang telah di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pamekasan telah melakukan pemeriksaan secara komperhensif tentang tugas pokok di lingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 - b. Setelah melakukan pemeriksaan masing-masing hakim pengawas bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan dilampiri hasil temuan hakim pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang ditemukan.
 - c. Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut, diserahkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator dan selanjutnya

diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan untuk dievaluasi.

- d. Ketua Pengadilan Agama Pamekasan setelah melakukan evaluasi atas hasil temuan hakim pengawas bidang, memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada masing-masing atasan langsung pejabat atau petugas yang melaksanakan pekerjaan itu agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dengan skala prioritas.
- e. Temuan- temuan yang tidak dapat segera diatasi dijadikan bahan pembuatan rencana kerja tahun berikutnya.

Menindak lanjuti pengaduan masyarakat baik yang mengenai tingkah laku aparat peradilan maupun mengenai jalannya peradilan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Nomor W13-A29/04/HM.01/SK/I/2021 tanggal 04 Januari 2021, menunjuk **Hery Kushendar, S.H.** Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pamekasan sebagai Petugas Hubungan Masyarakat dan Pejabat yang bertugas menangani pengaduan masyarakat pencari keadilan.

Penutup

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan tugas sepanjang Tahun 2021, Pengadilan Agama Pamekasan telah dapat melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) nya dengan baik dan lancar meskipun masih jauh dari sempurna.
2. Masyarakat pencari keadilan Agama Pamekasan telah merasakan peningkatan pelayanan dari tahun-tahun sebelumnya seperti telah tersedianya ruang pelayanan dan ruang tunggu pelayanan yang refresentatif bersih, rapih dan nyaman, mesin antrian pelayanan yang tertib, dan sms notifikasi yang memudahkan para pencari keadilan dalam mengetahui proses perjalanan perkaranya sehingga apa yang pencari keadilan rasakan sekarang menjadi lebih baik.
3. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Pamekasan telah mampu mengelola dan mendayagunakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada maupun sarana dan prasarana yang tersedia.
4. Adapun sumber daya manusia (SDM) yang ada di Pengadilan Agama Pamekasan adalah yang terdiri dari 23 orang ditambah 18 orang tenaga Honorer sebagai pelaksana utama dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi.
5. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan Hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif.
6. Jumlah pegawai di Pengadilan Agama Pamekasan masih sangat jauh dari standart, sehingga banyak pegawai yang menduduki rangkap jabatan. Untuk tahun 2021 banyak pegawai yang dimutasi sementara rekrutmen pegawai jumlahnya kurang memadai, sehingga bisa disimpulkan bahwa rekrutmen pegawai baru dengan kebutuhan tidak seimbang padahal tuntutan penyelesaian pekerjaan semakain besar, untuk itu dalam menyikapi keadaan seperti itu dituntut

- adanya kemauan dan kemampuan serta dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.
7. Penerapan administrasi umum dan arsip dinamis telah berjalan dengan baik.
 8. Pengelolaan keuangan terdiri dari Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan secara garis besar telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
 9. Secara kumulatif nilai capaian akhir Kebijakan Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2021 berhasil dengan baik.

B. REKOMENDASI

1. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon mengupayakan penambahan pejabat Hakim dan pegawai jurusita/Jurusita Pengganti maupun Panitera Pengganti dan Hakim agar tidak terjadi rangkap jabatan dan untuk memperlancar penyelesaian perkara.
2. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon mengupayakan peningkatan anggaran rutin dan modal khususnya anggaran perbaikan Gedung bangunan Kantor serta meubelair agar barang- barang yang usang / sudah tidak layak bisa diganti yang lebih layak, serta kendaraan bermotor untuk roda dua untuk menunjang pelaksanaan tugas jurusita serta kendaraan dinas roda 4 (empat).
3. Untuk Tenaga Honorer terutama yang sudah mengabdikan cukup lama agar diangkat menjadi PNS di Pengadilan Agama Pamekasan sehingga pelaksanaan tugas lebih lancar.
4. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dimohon mengupayakan peningkatan anggaran rutin untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi aparat peradilan serta pagu anggaran pada mata anggaran perjalanan dinas bisa sesuai dengan kebutuhan.
5. Pembinaan, pengawasan dan motivasi pegawai perlu ditingkatkan

dengan memperbanyak Diklat kepada pegawai sesuai dengan sasarannya.

6. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dimohon mengupayakan agar para Honorer yang sudah bekerja lama mengabdikan diri di Satker Pengadilan Agama Pamekasan diangkat menjadi CPNS.

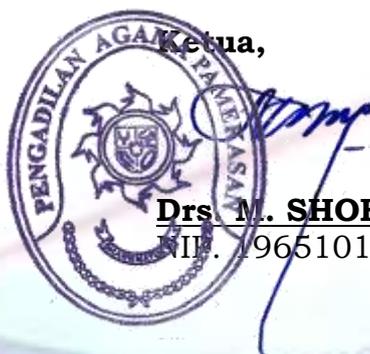
Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021, realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pamekasan yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.

Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam penyelesaian perkara menunjukkan angka cukup memuaskan.

Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang, kami sadar masih adanya kekurangan dalam penyusunan pembuatan laporan ini baik segi materi maupun sistematikanya, untuk itu kami mohon masukan ataupun kritikan yang konstruktif baik atas data-data maupun susunan materi dari semua pihak sangat diharapkan sebagai dasar untuk terus melakukan perbaikan.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya pembuatan laporan ini. Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT Amin.

Pamekasan, 05 Januari 2021.



Ketua,
Drs. M. SHOHIH, S.H., M.H.
NIK. 196510171994031002

DAFTAR BEZETTING FORMASI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

NO	NAMA TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	NIP / NO KARPEG	JABATAN			PANGKAT		PENDIDIKAN		LULUS	UMUR	KETERANGAN
			NAMA/ESELON	NOMOR DAN TANGGAL	TMT	GOL./RUANG	TMT	NAMA	10			
1	Drs. M. Shohih, SH., MH. Gresik, 17 Oktober 1965	19651017.199403.1.002 G.016258	Ketua/Hakim Madya Utama	174/KMA/SK/VII/2020 21-Jul-2020	11-08-2020	Pembina Utama Muda/ IV/c.	01-04-2018	S1. IAIN Sunan Ampel Surabaya S1. Universitas Cenderawasih S2. Universitas Narotama	1993 2002 2009	56		
2	Mashuri, S.Ag., M.H. Jakarta, 03 Mei 1977	19770503.200604.1.001 N.156809	Wakil Ketua/Hakim Madya Pratama	127/KMA/SK/VI/2021 22-Juni-2021	28-07-2021	Pembina IV/a.	01-10-2020	S1. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta S2. Universitas Islam Riau	2000 2011	44		
3	Dra. Hj. Farhanah, MH. Pamekasan, 21 September 1969	19690921.199203.2.002 E.977380	Hakim/Hakim Madya Utama	181/KMA/SK/VII/2020 24-Jul-2020	24-08-2020	Pembina Utama Muda/ IV/c.	01-10-2018	S1. IAIN Sunan Ampel Surabaya S2. Universitas Islam Jakarta	1992 2011	52		
4	Nurjumaatun Agustinah, S. Ag. Bangkalan, 22 Agustus 1969	19690822.199703.2.003 G.452940	Hakim/Hakim Madya Utama	3748/DJA/Kp.04.6/SK/12/2015 28-Des-2015	29-01-2016	Pembina Utama Muda/ IV/c.	01-04-2021	S1. IAIN Sunan Ampel Surabaya	1994	52		
5	Ismail, S. Ag., M.H.I. Bangkalan, 02 Juli 1976	19760702.200502.1.001 M.063879	Hakim Madya Pratama	154/KMA/SK/VIII/2021 10-Agu-21	03-09-2021	Pembina / IV/a.	01-04-2021	S1. IAIN Sunan Ampel Surabaya S2. IAIN Sulthan Syarif Kasim Riau	1999 2012	45		
6	Sugianto, S. Ag. Pamekasan, 19 Juni 1971	19710619.200604.1.001 N.032937	Hakim Madya Pratama	154/KMA/SK/VIII/2021 10-Agu-21	03-09-2021	Pembina / IV/a.	01-10-2020	S1. IAIN Sunan Ampel Surabaya	1996	50		
7	Isyhad Wira Budiawan, SHI., MSI. Sampang, 10 November 1980	19801110.201101.1.004 Q.213163	Hakim Pratama Madya	154/KMA/SK/VIII/2021 10-Agu-21	27-08-2021	Penata / III/c.	01-14-2018	S1. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta S2. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2007 2010	41		
8	Sudarmanto, SH. Pamekasan, 01 Januari 1969	19690101.199002.1.001 E.755002	Sekretaris	38/SEK/Peng.06.1/12/2015 16-Des-2015	30-12-2015	Pembina / IV/a.	01-04-2020	S1. Universitas Madura	2002	52		
9	St. Khodijah, S.H. Sampang, 01 Januari 1965	19650101.199403.2.006 G.084917	Panitera	2654/DJA/KP.04.6/SK/9/2021 14-Sep-21	21-10-2021	Pembina / IV/a.	01-04-2021	S1. Universitas Islam Malang	1992	56		
10	Zainal Arifin, SH. Sumenep, 07 Mei 1964	19640507.198703.1.005 E.368974	Panitera Muda Gugatan	076/DJA/KP.04.6/SK/01/2018 22-Jan-2018	29-03-2018	Penata Tingkat I/ III/d.	01-04-2015	S1. Universitas Merdeka Surabaya	2004	57		
11	Raden Ayu Fitrotin Nuzuliyah, S. Psi., SH. Pamekasan, 23 November 1980	19801123.200804.2.002 N.032929	Panitera Muda Permohonan	1462/DJA/Kp.04.6/SK/6/2015 17-Jun-2015	07-08-2015	Penata Tingkat I/ III/d.	01-04-2018	S1. Universitas Islam Negeri S1. Universitas Yos Soedarmo Surabaya	2004 2009	41		
12	Hery Kushendar, SH., MH. Pamekasan, 08 April 1982	19820408.200604.1.001 N.032936	Panitera Muda Hukum	076/DJA/KP.04.6/SK/01/2018 22-Jan-2018	29-03-2018	Penata Tingkat I/ III/d.	01-04-2018	S1. Universitas Muhammadiyah Jember	2004	39		
13	Muzakki Pamekasan, 11 Maret 1965	19650311.199203.1.003 F.311527	Kepala Sub Bagian Kepegawalan	38/SEK/Peng.06.1/12/2015 16-Des-2015	30-12-2015	Penata Tingkat I/ III/d.	01-10-2018	SLTA. SMPP. Negeri Pamekasan	1984	56		
14	Siti Halimah, SH. Bangkalan, 13 Juli 1982	19820713.200912.2.003 P.688444	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuar	748/SEK/Kp.1/SK/VI/2021 30-Jul-2021	27-08-2021	Penata / III/c.	01-04-2018	S1. Hukum UNCEN Jayapura	2007	39		
15	Bambang Wahyudiono, S.H. Sumenep, 15 Oktober 1979	19791015.201408.1.002 B.02005637	Kepala Sub Bagian Perencanaan	748/SEK/Kp.1/SK/VI/2021 30-Jul-2021	27-08-2021	Penata / III/c.	01-10-2020	S1. Universitas Dr. Soetomo Surabaya	2003	42		
16	H. Safudin, S.H., M.H. Sumenep, 02 April 1967	19670402.199303.1.006 F.049803	Panitera Pengganti	2656/DJA/KP.04.6/SK/9/2021 14-Sep-21	01-10-2021	Pembina / IV/a.	01-10-2017	S1. Darul Ulum S2. Universitas Muhammadiyah Surabaya	1995 2017	54		
17	Abdul Rachman, SH. Pamekasan, 01 Mei 1970	19700501.201408.1.001 B.02002209	Panitera Pengganti	2283/DJA/KP.04.6/SK/XI/2018 14-Nov-2018	04-01-2019	Penata Muda / III/a.	01-10-2019	S1. Universitas Merdeka Surabaya	2004	51		
18	Filriatus Shoidah Jombang, 01 Februari 1965	19650201.198903.2.003 E.818381	Pengadinistrasi Persuratan	448/SEK/Kp.I/SK/VI/2019 21-Jun-2019	21-06-2019	Penata Tingkat I/ III/d.	01-10-2017	SLTA. MA. Jombang	1986	56		
19	Chairul Imam Pamekasan, 05 Pebruari 1969	19690205.199003.1.001 E.874081	Teknisi Sarana dan Prasarana	1037/SEK/Kp.1/SK/XII/2020 16-Des-2019	06-01-2020	Penata Tingkat I/ III/d.	01-04-2017	SLTA. SMA. Pamekasan	1989	51		
20	Jauhari Pamekasan, 31 Desember 1969	19691231.201408.1.009 B.02002212	Pengadministrasi Hukum	W13-A29/2490/Kp.00.3/SK/VI/2015 31-Jul-2015	01-08-2015	Pengatur Muda / II/a.	01-10-2019	SLTA. Program Paket C Pamekasan	2019	52		
21	Erna Wagiana Palembang, 10 Juni 1971	19710610.201408.2.002 B.02002210	Jurusita Pengganti	W13-A29/751/Kp.003/VI/2020 02-Jun-2020	04-06-2020	Pengatur Muda Tingkat I/ II/b.	01-10-2018	SLTA. SMA PGRI. Pamekasan	1990	50		
22	Muhammad Ivan Setiawan, S.Kom. Surabaya, 24 Juni 1994	19940624.202012.1.003	Ahli Pertama Pranata Komputer	2028/SEK/CPNS.04.1/SK/XII/2020 28-Des-2020	01-12-2020	Penata Muda / III/a.	01-12-2020	S1. Stikom Surabaya	2018	27	CPNS	
23	Ulif Laili Amalia, A. Md.A.B. Bogor, 07 Juli 1995	19950707.202012.2.019	Pengadministrasi Register Perkars	2018/SEK/CPNS.04.1/SK/XII/2020 28-Des-2020	01-12-2020	Pengatur Tingkat I/ II/c.	01-12-2020	Politeknik Negeri Jakarta	2018	26	CPNS	

Pamekasan, 14 Desember 2021
Ketua



Drs. M. Shohih, SH., MH.
NIP : 19651017 199403 1 002

MAHKAMAH AGUNG RI

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Unit Organisasi : Pengadilan Agama
Tempat : Pamekasan

BERLAKU UNTUK TAHUN 2021

NO	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		PENDIDIKAN		USIA TGL. LAHIR	CATATAN MUTASI KEPEGAWAIAN	KET	
			GOL./RUANG	TMT	NAMA	TMT	TH	BLN	NAMA	LULUS TAHUN				TK. IJAZAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Drs. M. SHOHIH, SH., MH.	19651017.199403.1.002	Pembina Utama Muda/ IV/c.	01-04-2018	Ketua	11-08-2020	26	6	S1. IAIN Sunan Ampel Surabaya S1. Universitas Cenderawasih S2. Universitas Narotama	1993 2002 2009	S2	56	01-04-2022	
2	Dra. Hj. FARHANAH, MH.	19690921.199203.2.002	Pembina Utama Muda/ IV/c.	01-10-2018	Hakim	24-08-2020	28	6	S1. IAIN Sunan Ampel Surabaya S2. Universitas Islam Jakarta	1992 2011	S2	52	01-10-2022	
3	NURJUMAATUN AGUSTINAH, S.Ag.	19690622.199703.2.003	Pembina Utama Muda/ IV/c.	01-04-2021	Hakim	28-01-2016	23	6	S1. IAIN Sunan Ampel Surabaya	1994	S1	52	01-04-2025	
4	H. SAFIUDIN, S.H., M.H.	19670402.199303.1.006	Pembina/ IV/a.	01-10-2017	Panitera Pengganti	01-10-2021	28	7	S1. Universitas Darul Ulum S2. Unmu Surabaya	1995 2017	S2	54	-	
5	SUDARMANTO, SH.	19690101.199002.1.001	Pembina/ IV/a.	01-04-2020	Sekretaris	30-12-2015	30	7	S1. Universitas Madura	2003	S1	52	-	
6	MASHURI, S.Ag., S.H.	19770503.200604.1.001	Pembina/ IV/a.	01-10-2020	Wakil Ketua	28-07-2021	15	3	S1. IAIN Syarif Hidayatullah S2. Universitas Islam Riau	2000 2011	S2	44	01-10-2024	
7	SUGIANTO, S.Ag.	19710619.200604.1.001	Pembina/ IV/a.	01-10-2020	Hakim	03-09-2021	15	5	S1. IAIN Sunan Ampel Surabaya	1996	S1	50	01-10-2024	
8	ISMAIL, S.Ag., M.H.I.	19780702.200502.1.001	Pembina/ IV/a.	01-04-2021	Hakim	03-09-2021	16	6	S1. IAIN Sunan Ampel Surabaya S2. Univ. Islam Negeri S.Syarif Kasim Riau	1999 2012	S2	45	01-10-2025	
9	ST. KHODIJAH, S.H.	19650101.199403.2.006	Pembina/ IV/a.	01-04-2021	Panitera	21-10-2021	27	7	S1. Universitas Islam Malang	1992	S1	56	-	
10	ZAINAL ARIFIN, SH.	19640507.198703.1.005	Penata Tingkat I/ III/d.	01-04-2015	Panitera Muda Gugatan	02-06-2021	33	6	S1. Universitas Merdeka Surabaya	2004	S1	57	-	
11	CHAIRUL IMAM	19690205.199003.1.001	Penata Tingkat I/ III/d.	01-04-2017	Teknisi Sarana dan Prasarana	16-12-2019	30	6	SLTA. SMA. Pamekasan	1989	SMA	52	-	
12	Hj. FITRIATUS SHOIHAH	19650201.198903.2.003	Penata Tingkat I/ III/d.	01-10-2017	Pengadministrasi Penukutan	21-06-2019	31	6	Madrasah Aliyah Jombang	1986	SMA	56	-	
13	HERY KUSHENDAR, SH.	19820408.200604.1.001	Penata Tingkat I/ III/d.	01-04-2018	Panitera Muda Hukum	28-03-2018	14	5	S1. Universitas Muhammadiyah Jember	2004	S1	38	01-04-2022	
14	R.A. FITROTIN NUZULIYAH, S.Psi.SH.	19801123.200604.2.002	Penata Tingkat I/ III/d.	01-04-2018	Panitera Muda Permohonan	02-06-2021	14	5	S1. Universitas Islam Negeri S1. Universitas Yos Soedarmo Surabaya	2004	S1	41	01-04-2022	
15	MUZAKKI	19650311.199203.1.003	Penata Tingkat I/ III/d.	01-10-2018	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	30-12-2015	28	6	SLTA. SMPP. Negeri Pamekasan	1984	SMA	56	-	
16	SITI HALIMAH, SH.	19820713.200912.2.003	Penata/ III/c.	01-04-2018	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	27-08-2021	10	9	S1. Hukum UNCEN Jayapura	2007	S1	39	01-04-2022	
17	ISYHAD WIRA BUDIOWAN, S.H.I., M.S.I.	19801110.201101.1.004	Penata/ III/c.	01-04-2018	Hakim	27-08-2021	10	8	S1. Univ. Islam Negeri Sunan Kali Jaga S2. Univ. Islam Negeri Sunan Kali Jaga	2007 2010	S2	41	01-04-2022	
18	BAMBANG WAHYUDIONO, S.H.	19791015.201408.1.002	Penata/ III/c.	01-10-2020	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	27-08-2021	17	1	S1. Universitas Dr. Soetomo Surabaya	2003	S1	42	01-10-2024	
19	ABDUL RACHMAN, SH.	19700501.201408.1.001	Penata Muda / III/a.	01-10-2019	Panitera Pengganti	04-01-2019	6	1	S1. Universitas Merdeka Surabaya	2004	S1	51	01-10-2023	
20	MUHAMMAD IVAN SETIAWAN, S.Kom	19940624.202012.1.003	Penata Muda / III/a.	01-12-2020	Ahli Pertama Pranata Komputer	01-12-2020	0	0	S1. Stikom Surabaya	2016	S1	27	01-12-2024	CPNS
21	ULFI LAILI AMALIA, A.Md.A.B.	19950707.202012.2.019	Pengatur Tingkat I/ II/c.	01-12-2020	Pengadministrasi Register Perkara	01-12-2020	3	0	Politeknik Negeri Jakarta	2018	D III	26	01-12-2022	CPNS
22	ERNA WAGIANA	19710610.201408.2.002	Pengatur Muda Tingkat I/ II/b.	01-10-2018	Jurusita Pengganti	04-06-2020	6	1	SLTA. SMA PGRI. Pamekasan	1990	SMA	50	01-10-2022	
23	JAUHARI	19691231.201408.1.009	Pengatur Muda / II/a.	01-10-2019	Pengadministrasi Hukum	01-08-2015	6	1	SLTA. Program Paket C Pamekasan	2011	SMA	52	01-10-2023	

Pamekasan, 14 Desember 2021
Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

[Signature]
Drs. M. SHOHIH, SH., MH.
NIP. 19651017.199403.1.002

A. LAMPIRAN KEPANITERAAN TAHUN 2021

- 1. PELAKSANAAN SITA DAN EKSEKUSI**
- 2. LAPORAN KEUANGAN PERKARA**
- 3. REKAP AKTA CERAI**
- 4. LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA**

1. PELAKSANAAN EKSEKUSI

No.	Sisa Tahun Lalu	Pelaksanaan Eksekusi					Prosentase Pelaksanaan
		Diterima	Telah Dilaksanakan	Belum Terlaksana	Gagal / Tidak Terlasana	Cabut	
1	3	5	4	4	0	0	50%

2. LAPORAN KEUANGAN PERKARA (LONAS)

No. URUT	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
1	Saldo Awal	102.665.200,00	
2	Penerimaan	1.589.531.000,00	
3	Biaya Proses /ATK/pemberkasan		117.950.000,00
4	Biaya Panggilan		745.203.000,00
5	Biaya Penerjemah		-
6	Biaya Pemberitahuan		170.518.000,00
7	Biaya Sita		1.300.000,00
8	Biaya Pemeriksaan Setempat		12.325.000,00
9	Biaya Sumpah		-
10	Biaya Pengiriman		2.050.000,00
11	Materai		24.600.000,00
12	PNBP		-
	Biaya Pendaftaran		71.020.000,00
	Redaksi dan Lainnya		24.470.000,00
	PNBP Lain-Lain		68.070.000,00
13	Pengembalian Sisa Panjar		399.259.400,00

14	Biaya Lain-Lain		2.291.800,00
	Jumlah	1.692.196.200,00	1.639.057.200,00
	Saldo Akhir		53.139.000,00
	Saldo Bank		50.236.100,00
	Saldo Kas Tunai		2.902.900,00

3. REKAP AKTA CERAI

No.	Bulan	Jumlah Diterbitkan	Jumlah Diserahkan		Keterangan
			Suami	Istri	
1	Januari	206	70	90	L = 33, P = 13
2	Pebruari	356	101	162	L = 71, P = 16
3	Maret	240	73	98	L = 47, P = 22
4	April	214	63	92	L = 44, P = 15
5	Mei	202	62	96	L = 39, P = 5
6	Juni	186	60	74	L = 33, P = 19
7	Juli	258	73	108	L = 56, P = 21
8	Agustus	210	55	88	L = 50, P = 12
9	September	194	47	84	L = 50, P = 13
10	Oktober	270	76	107	L = 59, P = 28
11	Nopember	306	56	125	L = 97, P = 28
12	Desember	256	57	83	L = 69, P = 41
Jumlah		1447			

Keterangan Akta Cerai yang rusak tahun 2021 :

1. Nomor Seri : M 82816
2. Nomor Seri : M 82817
3. Nomor Seri : M 82953
4. Nomor Seri : M 83080
5. Nomor Seri : M 83198
6. Nomor Seri : M 83794
7. Nomor Seri :
8. Nomor Seri :
9. Nomor Seri :

4. LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENISPERKARA (LONAS)

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
Bulan Januari - Desember 2021

Kode	Jenis perkara	Banyaknya perkara			Dicabut dan di Putus bulan ini							Sisa akhir bulan 5-11)	Banding	Kasasi	PK	Ket.
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Jumlah lajur 6 s/d 10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Izin Poligami	1	1	2	1	1					2	0				
2	Pencegahan Perkawinan											0				
3	Penolakan Perkawinan											0				
4	Pembatalan Perkawinan											0				
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri											0				
6	Cerai Talak	61	549	610	37	526	2	9	1	2	577	33	2			
7	Cerai Gugat	103	940	1043	51	932		1	2	4	990	53	3	2		
8	Harta Bersama		1	1	0	1					1	0				
9	Penguasaan Anak	1	5	6	2	4					6	0				
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu											0				
11	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami											0				
12	Pengesahan Anak											0				
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua											0				
14	Perwalian	2	33	35		34		1			35	0				
15	Pencabutan Kekuasaan Wali											0				
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan											0				
17	Ganti Rugi terhadap Wali											0				
18	Asal Usul Anak		1	1		1					1	0				
19	Perkawinan Campuran											0				

20	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	13	421	434	19	384	1	2	17	1	424	10				
21	Izin Kawin											0				
22	Dispensasi Kawin	3	324	327	12	308	4	0	3	0	327	0				
23	Wali Adhol	1	8	9	2	6				1	9	0				
24	Kewarisan	3	7	10	2	6		1			9	1	3			
25	Wasiat											0				
26	Hibah											0				
27	Wakaf											0				
28	Lain-Lain		7	7		7					7	0				
29	Ekonomi Syariah											0				
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	1	62	63	7	54		2			63	0				
	JUMLAH	189	2359	2548	133	2264	7	16	23	8	2451	97	8	2	0	0



 Drs. M. SHOHIH, SH. MH
 NIP. 19651017199403 1 002

Sampang, 31 Desember 2021

Panitera,



 ST. KHODIJAH, SH
 NIP. 19650101199403 2 006

B. LAMPIRAN KESEKRETARIATAN TAHUN2021

- 1. SKP**
- 2. SOP**
- 3. PNBP 401271 DAN 401272**

1. SKP (Sasaran Kerja Pegawai) Tahun 2021

No.	Sasaran Kerja Pegawai	Jumlah Kegiatan	Keterangan
1.	Ketua	41	-
2.	Wakil Ketua	17	-
3.	Hakim	14	-
4.	Panitera	20	-
5.	Sekretaris	21	-
6.	Wakil Panitera	15	-
7.	Panitera Muda Gugatan	10	-
8.	Panitera Muda Permohonan	9	-
9.	Panitera Muda Hukum	9	-
10.	Pengadministrasi Hukum	10	-
11.	Pengadministrasi Registrasi Perkara	24	-
12.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	24	-
13.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	18	-
14.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan	23	-
15.	Panitera Pengganti	15	-
16.	Jurusita Pengganti	7	-
17.	Pengadministrasi Persuratan	10	-
18.	Teknisi Sarana dan Prasarana	14	-
19.	Pranata Komputer	24	-

2. SOP (Standar Operasional Prosedur) Tahun 2021

No.	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
I.	Teknis Pengadilan Tk. Pertama			
1.	Ketua	16	1. SOP Layanan sidang Diluar Gedung 2. SOP Penetapan Majelis Hakim 3. SOP Pelayanan Pemanggilan Saksi 4. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain 5. SOP Permohonan Bantuan Pemeriksaan saksi Dari Pengadilan Agama Lain 6. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama Lain 7. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain 8. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama 9. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding 10. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi 11. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil	1. SOP/AP/03 2. SOP/AP/06 3. SOP/AP/17 4. SOP/AP/18 5. SOP/AP/19 6. SOP/AP/21 7. SOP/AP/22 8. SOP/AP/53 9. SOP/AP/54 10. SOP/AP/55 11. SOP/AP/56

			12. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang	12. SOP/AP/57
			13. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama Dengan Lelang	13. SOP/AP/58
			14. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Dari Pengadilan Agama Lain	14. SOP/AP/60
			15. SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi	15. SOP/AP/61
			16. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Rukyah Hilal	16. SOP/AP/62
2.	Wakil Ketua	9	1. SOP Manajemen Resiko Pengadilan Agama	1. SOP/AM/01
			2. SOP Pengendalian Dokumen	2. SOP/AM/02
			3. SOP Pengendalian Rekaman Arsip/ Catatan Mutu	3. SOP/AM/03
			4. SOP Komunikasi	4. SOP/AM/04
			5. SOP Self Asessment	5. SOP/AM/05
			6. SOP Tinjauan Manajemen	6. SOP/AM/06
			7. SOP Pengendalian Produk/Layanan Tidak Sesuai	7. SOP/AM/07
			8. SOP Survey Kepuasan Masyarakat	8. SOP/AM/08
			9. SOP Tindakan Perbaikan	9. SOP/AM/09
3.	Hakim	6	1. SOP Penetapan Hari Sidang	1. SOP/AP/09
			2. SOP Pelayanan Mediasi	2. SOP/AP/14
			3. SOP Pelayanan Penundaan Sidang	3. SOP/AP/16
			4. SOP Pemeriksaan Setempat	4. SOP/AP/20
			5. SOP Pelayanan Ikrar Talak	5. SOP/AP/33
			6. SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah memenuhi syarat dengan pemeriksaan sederhana	6. SOP/AP/41
4.	Panitera	16	1. SOP Penunjukan Panitera Pengganti	1. SOP/AP/07

		2. SOP Penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti	2. SOP/AP/08
		3. SOP Permohonan bantuan Panggilan/ Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain	3. SOP/AP/11
		4. SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Menambah Panjar	4. SOP/AP/23
		5. SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Tidak Menambah Panjar	5. SOP/AP/24
		6. SOP Pelayanan Sita Buntut	6. SOP/AP/25
		7. SOP Pelayanan Sita Buntut	7. SOP/AP/26
		8. SOP Pelayanan Pengembalian Sita Jaminan	8. SOP/AP/29
		9. SOP Pelayanan Penyerahan Salinan Putusan Kepada Para Para Pihak	9. SOP/AP/30
		10. SOP Pelayanan Penyerahan Produk Pengadilan	10. SOP/AP/34
		11. SOP Pelayanan Permintaan Salinan Putusan Yang Sudah Berkekuatan hukum Tetap ke KUA	11. SOP/AP/37
		12. SOP Pelayanan Permintaan Salinan Putusan/ Penetapan	12. SOP/AP/38
		13. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain	13. SOP/AP/59
		14. SOP Pengelolaan ATK Perkara	14. SOP/AP/69
		15. SOP Pelayanan Pengelolaan Keuangan Perkara	15. SOP/AP/70
		16. SOP Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar	16. SOP/AP/71

5.	Panitera Muda Hukum	9	1. SOP Layanan Informasi	1. SOP/AP/01
			2. SOP Layanan Pos Bantuan Hukum	2. SOP/AP/02
			3. SOP Penerimaan Perkara	3. SOP/AP/04
			4. SOP Pelayanan Pembayaran Panjar Biaya Perkara	4. SOP/AP/05
			5. SOP Pelayanan Pengembalian Kutipan Akta Nikah	5. SOP/AP/31
			6. SOP Pelayanan Panyampaiaj Salinan Putusan Kepada Para Pihak	6. SOP/AP/36
			7. SOP Pengarsipan	7. SOP/AP/63
			8. SOP Pelaporan	8. SOP/AP/64
			9. SOP Pengaduan	9. SOP/AP/65
6.	Panitera Muda Gugatan	18	1. SOP Pelayanan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap	1. SOP/AP/32
			2. SOP Pelayanan Penyerahan Akta Cerai	2. SOP/AP/35
			3. SOP Pelayanan Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak	3. SOP/AP/36
			4. SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Gugat	4. SOP/AP/39
			5. SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak	5. SOP/AP/40
			6. SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat	6. SOP/AP/42
			7. SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara sederhana dalam ekonomi syariah yang telah melewati batas waktu	7. SOP/AP/43

			8. SOP Pelayanan Pengajuan keberatan dalam perkara upaya hukum perkara sederhana dalam ekonomi syariah yang memenuhi batas waktu	8. SOP/AP/44
			9. SOP Pelayanan Banding	9. SOP/AP/45
			10. SOP Pelayanan Kasasi	10. SOP/AP/46
			11. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan melebihi Batas Waktu	11. SOP/AP/47
			12. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi	12. SOP/AP/48
			13. SOP Pelayanan Peninjauan Kembali	13. SOP/AP/49
			14. SOP Pelayanan Prodeo Tingkat Pertama	14. SOP/AP/50
			15. SOP Pelayanan Prodeo pada Tingkat Banding	15. SOP/AP/51
			16. SOP Pelayanan prodeo Pada Tingkat Kasasi	16. SOP/AP/52
			17. SOP Pelayanan Permohonan Perceraian PNS, TNI dan POLRI	17. SOP/AP/66
			18. SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus	18. SOP/AP/67
7	Panitera Muda Permohonan	5	1. SOP Pelayanan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap	1. SOP/AP/32
			2. Sop Pelayanan Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak	2. SOP/AP/36
			3. SOP Pelayanan Permohonan Perceraian PNS' TNI' dan POLRI	3. SOP/AP/66

			4. SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus	4. SOP/AP/67
			5. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah	5. SOP/AP/68
8	Panitera Pengganti	1	SOP Kegiatan Persiapan Persidangan	1. SOP/AP/13
9	Jurusita/JSP	5	1. SOP Pemanggilan Para Pihak	1. SOP/AP/10
			2. SOP Permohonan Bantuan Panggilan dan Pemberitahuan Dari Pengadilan Agama Lain	2. SOP/AP/12
			3. SOP Pemanggilan Mediasi	3. SOP/AP/15
			4. SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara	4. SOP/AP/27
			5. SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan	5. SOP/AP/28
II	Non Teknis			
1.	Sekretaris	3	1. SOP Pendelegasian Wewenang	1. SOP/AS/13
			2. SOP Pertanggung Jawaban Anggaran	2. SOP/AS/26
			3. SOP Penyusunan SAKIP	3. SOP/AS/30
2.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	14	1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Penyampaian Tugas peran dan Tanggung Jawab	1. SOP/AS/01
			2. SOP Pengembangan Pegawai	2. SOP/AS/02
			3. SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar	3. SOP/AS/03
			4. SOP Pengelolaan Pegawai	4. SOP/AS/04
			5. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai Pensiun dan BPJS	5. SOP/ AS/05
			6. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai	6. SOP/AS/06
			7. SOP Pengajuan Cuti Pegawai	7. SOP/AS/07
			8. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat	8. SOP/AS/08
			9. SOP Kenaikan Gaji Berkala	9. SOP/AS/09

			10. SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai	10. SOP As/10
			11. SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai	11. SOP/AS 11
			12. SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai	12. Sop/AS/12
			13. SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai	13. SOP/AS/13
			14. SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara	14. SOP/AS/15
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	10	1. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas	1. SOP/AS/16
			2. SOP Administrasi Persuratan (Surat Masuk dan Surat Keluar)	2. SOP/AS/17
			3. SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif	3. SOP/AS/18
			4. SOP Penatausahaan Aset	4. SOP/AS/19
			5. SOP Penatausahaan Persediaan	5. SOP/AS/20
			6. SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan	6. SOP/AS/21
			7. SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan	7. SOP/AS/22
			8. SOP Pengelolaan Perpustakaan	8. SOP/AS/24
			9. SOP Pencairan Anggaran	9. SOP/AS/25
			10. SOP Penatausahaan PNBPN	10. SOP/AS/27
4.	Kepala Sub Bagian Pelaporan Dan Pengembangan IT	5	1. SOP Pemberian Informasi	1. SOP/AS/23
			2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan	2. SOP/AS/28
			3. SOP Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran	3. SOP/AS/29
			4. SOP Penyusunan Laporan	4. SOP/AS/31
			5. SOP Pengelolaan TI	5. SOP/AS/32

3. PNBP 401551 Dan 401552

Bulan	PNBP 401551		PNBP 401552			
	423141	Jumlah PNBP 401551	425232	425233	425239	Jumlah PNBP 401552
Januari	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.210.000	Rp 9.260.000	Rp -
Februari	Rp -	Rp -	Rp 90.000	Rp 5.270.000	Rp 9.450.000	Rp -
Maret	Rp -	Rp -	Rp 200.000	Rp 5.630.000	Rp 9.820.000	Rp -
April	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.120.000	Rp 9.270.000	Rp -
Mei	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.500.000	Rp 7.170.000	Rp -
Juni	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8.090.000	Rp 11.680.000	Rp -
Juli	Rp -	Rp -	Rp 60.000	Rp 3.050.000	Rp 7.070.000	Rp -
Agustus	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.190.000	Rp 7.605.000	Rp -
September	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.020.000	Rp 8.670.000	Rp -
Oktober	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.300.000	Rp 9.240.000	Rp -
November	Rp -	Rp -	Rp 110.000	Rp 6.130.000	Rp 10.900.000	Rp -
Desember	Rp -	Rp -	Rp 60.000	Rp 7.510.000	Rp 13.410.000	Rp -
TOTAL	-	Rp -	Rp 520.000	Rp 71.020.000	Rp 110.545.000	Rp -



PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Jalan Raya Tlanakan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan

Website : <http://pa-pamekasan.com>

Yahoo Mail : pa_pmk126@yahoo.com

Google Mail : pa.pmk126@gmail.com

PAMEKASAN 69371

LAMPIRAN XII

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA-RI

Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011

Tanggal : 5 Januari 2011

LAPORAN TAHUNAN PALAYANAN INFORMASI

Periode : Januari - Desember 2021

A. RINGKASAN LAPORAN

Pelayanan Informasi

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana

Pengadilan Agama Pamekasan memiliki sarana Meja Informasi, Formulir Informasi, 1 (satu) unit komputer, alat tulis yang berada di ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Selain itu, sarana dan prasarana informasi yang lain berupa fasulitas IT yaitu instalasi jaringan kabel LAN dan WiFi, serta websiter Pengadilan Agama Pamekasan yang dapat diakses melalui situs <https://pa-pamekasan.go.id> dan e-mail pa_pmk126@yahoo.com / pa.pmk126@gmail.com.

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan SK KMA Nomor 1-144/KMA/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Ketua Pengadilan Agama Pamekasan diberikan kewajiban untuk menunjuk dan mengangkat petugas informasi dan dokumentasi di lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan dengan struktur pelaksanaan sebagai berikut:

1. Ketua sebagai atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2. Panitera/Sekretaris sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
3. Pejabat Eselon IV pada Pengadilan Agama Pamekasan sebagai Penanggung Jawab Informasi
4. Panitera Muda Hukum atau Pegawai lain yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan sebagai Petugas Informasi

Dalam tugas struktur pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tersebut dilaksanakan dengan baik dan petugas informasi memberikan pelayanan informasi yang telah disediakan dengan cara membuka website Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan oleh publik dan para pencari keadilan.

Untuk pelayanan permintaan informasi yang berupa prosedur biasa dan prosedur khusus telah disediakan dalam bentuk formulir untuk mengisi permintaan informasi yang dibutuhkan.

3. Anggaran

Anggaran hanya untuk biaya hosting website di Jagoan Hosting sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-tahun, sedangkan biaya langganan internet Lintas Arta sebesar Rp. 156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) per-tahun.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai / Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	87	15 menit	87					
Kepegawaian								
Pengawasan & Pendisiplinan								
Anggaran & Aset								
Lainnya								
Total****	87		87					

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan*	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan**		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi***	Hasil Mediasi di Komisi Informasi****		Status Putusan Komisi Informasi*****	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan								
Kepegawaian								
Pengawasan & Pendisiplinan								
Anggaran & Aset								
Lainnya								
Total*****	0	0	0	0	0	0	0	0

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Kendala Internal:

Petugas Informasi berbenturan dengan pelaksanaan tugas pokoknya.

Kendala Eksternal:

- **Kondisi Masyarakat**, keadaan masyarakat juga menjadi kendala dalam keterbukaan informasi publik, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Pamekasan dan sebagian besar daerah pedesaan dengan kondisi masyarakat yang tradisional, sehingga akses informasi yang disiapkan di Pengadilan Agama Pamekasan tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat yang pemahaman teknologinya rendah.

- **Teknologi Pendukung**, teknologi pendukung seperti jaringan internet, telekomunikasi dan sebagainya menjadi salah satu kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik, tidak semua masyarakat Kabupaten Pamekasan dapat mengakses internet dan tidak seluruhnya dapat mengakses website Pengadilan Agama Pamekasan, sebagai contoh bagi masyarakat, mahasiswa lebih sering datang ke kantor Pengadilan Agama Pamekasan untuk mendapatkan informasi publik ketimbang melihat SIPP Online atau Publikasi Putusan di website.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Perlu petugas khusus untuk pelayanan Meja Informasi.



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

[Handwritten signature]
Drs. M. SHOHIH, S.H., M.H.

Pamekasan, 31 Desember 2021

Panitera,

[Handwritten signature]
ST. KHODIJAH, S.H.



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
NOMOR: W13-A29/2291.a/OT.01.2/12/2021**

Tentang

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk lebih meningkatkan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas di Pengadilan Agama Pamekasan perlu adanya evaluasi sebagai tolok ukur pelaksanaan tugas tahun berjalan perlu adanya laporan akhir tahun;
2. Bahwa untuk mempersiapkan penyusunan laporan tahunan tahun 2021 pada Pengadilan Agama Pamekasan, dipandang perlu menetapkan tim penyusunan laporan tahunan tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 143/KMAISKN/III/2007 tentang Memberlakukan Buku I bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan);
- Memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor'. 1930A/SEK/OT.01.2/11/2021 tanggal 27 November 2018 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2021;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TAHUN 2021
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021:

- Kedua : Nama-nama yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini supaya melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil penyusunannya kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 14 Desember 2021

Ketua Pengadilan Agama Pamekasan



Drs. M. SHOHIH, S.H., M.H.

NIP. 19651017 199403 1 002

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
NOMOR: W13-A29/2291.a/OT.01.2/12/2021
Tanggal : 14 Desember 2021

TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK/ DIANGKAT SEBAGAI
1.	Drs. M. Shohih, S.H., M.H.	Ketua	Pelindung /Penasehat
2.	Mashuri, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	St. Khodijah, S.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
4.	Sudarmanto, S.H.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
5.	Zainal Arifin, S.H.	Panitera Muda Gugatan	Anggota
6.	RA. Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., SH,	Panitera Muda Permohonan	Anggota
7.	Hery Kushendar, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	Bambang Wahyudiono, S.H.	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
9.	Siti Halimah, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10.	Muzakki	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
11.	Muhammad Ivan Setiawan, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
12.	Ulfi Laili Amalia, A.Md.A.B.	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Anggota
13.	Ahmad Syarqawi, S.Pd.I.	Pramubhakti	Anggota
14.	Ahmad Bahri, S.H.	Pramubhakti	Anggota
16.	Ach. Rifadi. S.Pd., S.H.	Pramubhakti	Anggota
17.	Hairil Anwar, S.Kom.	Pramubhakti	Anggota
18.	Samsul Muarif	Pramubhakti	Anggota
19.	Nurus Safarina S, S.Sy.	Pramubhakti	Anggota
20.	Deky Apriyanto Pranata Farzak, S.H.	Pramubhakti	Anggota



ditetapkan di : Pamekasan
 Pada tanggal : 14 Desember 2021
 Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

Drs. M. SHOHIH, S.H., M.H.
NIP. 19651017 199403 1 002